

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PKH MELALUI
PROGRAM MBG DI DESA BAGELEN KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN**

(Skripsi)

**Oleh :
FELIA NOVA RAMANDHA
NPM 2216011011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PKH
MELALUI PROGRAM MBG DI DESA BAGELEN KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh :
FELIA NOVA RAMANDHA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PROGRAM MBG DI DESA BAGELEN KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

FELIA NOVA RAMANDHA

Peningkatan kesejahteraan keluarga PKH melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran masih menghadapi permasalahan belum optimalnya penyediaan kebutuhan pangan bergizi bagi sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), terutama anak-anak usia sekolah yang berpotensi mempengaruhi kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program MBG, menganalisis dampaknya, dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya dengan menggunakan pendekatan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG memberikan manfaat yang signifikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, terutama dalam pemenuhan gizi anak, pengurangan beban rumah tangga, serta dukungan terhadap proses belajar di sekolah. Pelaksanaan program MBG di Desa Bagelen telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga PKH, terutama dalam penyediaan gizi dan pengurangan beban ekonomi. Namun, keberhasilan program masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berkelanjutan karena adanya kendala struktural, kultural, dan manajerial. Diperlukan peningkatan koordinasi, validitas data, dan pengawasan untuk mengoptimalkan fungsi program dan mencapai tujuan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Kata Kunci: Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PKH), Struktural Fungsional, Implementasi Program

ABSTRACT

IMPROVING FAMILY WELFARE THROUGH THE MBG PROGRAM IN BAGELEN VILLAGE, GEDONG TATAAN DISTRICT, PESAWARAN REGENCY

By

FELIA NOVA RAMANDHA

Improving the welfare of PKH families through the Free Nutritious Meals (MBG) program in Bagelen Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, still faces the problem of suboptimal provision of nutritious food needs for some Beneficiary Families (KPM) of the Family Hope Program (PKH), especially school-aged children, which has the potential to affect health, growth, and learning abilities. This study aims to analyze the implementation of the MBG program, analyze its impact, and identify obstacles in its implementation using Talcott Parsons' Structural Functional Theory approach. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that the MBG program provides significant benefits for PKH Beneficiary Families (KPM), especially in fulfilling children's nutritional needs, reducing household burdens, and supporting the learning process at school. The implementation of the MBG program in Bagelen Village has had a positive impact on improving the welfare of PKH families, especially in providing nutrition and reducing economic burdens. However, the success of the program is still partial and not fully sustainable due to structural, cultural, and managerial constraints. Improved coordination, data validity, and oversight are needed to optimize program functions and achieve overall family welfare goals.

Keywords: Improving Family Welfare, Free Nutritional Meal Program (MBG), Family Hope Program (PKH), Functional Structure, Program Implementation

Judul Skripsi : **PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PKH MELALUI POGRAM
MBG DI DESA BAGELEN KECAMATAN
GEDONG TATAAN KABUPATEN
PESAWARAN**

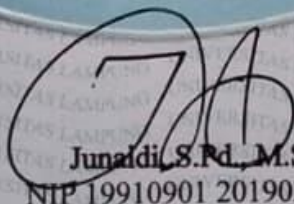
Nama Mahasiswa : **Felia Nova Ramandha**

Nomor Induk Mahasiswa : **2216011011**

Program Studi : **Sosiologi**

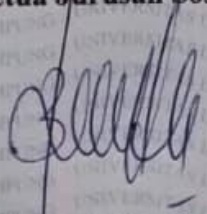
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Junaldi, S.Pd., M.Sos.

NIP 19910901 201903 1 010

2. Ketua Jurusan Sosiologi

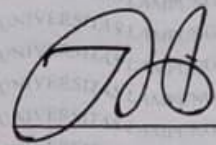

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

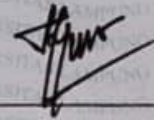
**1. Tim Penguji
Ketua**

: Junaidi, S.Pd., M.Sos.



Penguji Utama

: Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP.19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Felia Nova Ramandha

NPM. 2216011011

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 November 2003 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Rudi Siswardi, S.Pd., M.M dan Ibu Infa Yurni. Pendidikan formal penulis diawali pada tahun 2008 di PAUD Darulamanah Way Lima Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Attawakal pada tahun 2009. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 9 Gadingrejo dan diselesaikan pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gadingrejo hingga lulus pada tahun 2019. Pendidikan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2022.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi pada bidang minat dan bakat periode 2023–2024. Selain itu, penulis juga melaksanakan kegiatan Kerja Kuliah Nyata (KKN) pada tahun 2024 di Desa Sinar Karya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al- Baqarah: 286)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

“Perang telah usai, aku bisa pulang, kubaringkan panah dan berteriak MENANG”
(Diakhir Perang-Nadin Amizah)

“Rasakanlah ketakutan itu, dan tetapah melakukannya”
(Tamara Mellon)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya ini ku persembahkan kepada:

Ayahanda Tercinta Rudi Siswardi, S.Pd., M.M dan Ibunda Infa Yurni

Tercinta

Ayah (Bak) merupakan sosok yang tangguh, penuh perjuangan, dan tidak pernah lelah memberikan nasihat serta dukungan dalam setiap langkah hidupku. Mama adalah sosok yang penuh kasih sayang, sabar, dan senantiasa memberikan doa dan semangat tanpa henti. Seberapapun besar usaha yang aku lakukan, hal tersebut tidak akan pernah sebanding dengan segala jasa dan pengorbanan yang telah kalian berikan selama ini. Hanya doa yang dapat kupanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang kepada Bak dan Mama sehingga dapat menyaksikan setiap keberhasilan yang akan aku raih di masa depan. Karena setiap langkah dan keberhasilanku kelak tidak terlepas dari doa dan jerih payah Bak dan Mama.

Kakak dan Adikku Tersayang

Kakak dan adikku tersayang Rifa Detia Maharani, S.M dan Arifa Rizkia Naully. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi kebahagiaan dan kekuatan dalam setiap perjalanan hidupku. Semoga kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga ini selalu terpelihara, serta kita semua dapat meraih kesuksesan di masa depan dan membahagiakan Bak dan Mama.

Almamaterku, Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKH Melalui Program MBG di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan, baik berupa bimbingan, arahan, maupun kerja sama dari berbagai pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat, karunia, serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

5. Dosen pembimbing skripsi yakni, Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos. Terima kasih atas bimbingan, arahan, masukan serta kesabaran yang telah diberikan selama proses pengerjaan skripsi;
6. Ibu Dra. Yuni Ratna Sari, M.Si selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas kritik dan saran yang sangat bermanfaat untuk penelitian ini;
7. Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H selaku Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama penulis menempuh masa perkuliahan;
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama proses perkuliahan;
9. Seluruh staff akademik, administrasi, tata usaha, para pegawai, serta staff keamanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, pelayanan, serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran terimakasih telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang sehingga penulis memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, serta pengalaman mengenai pelaksanaan program dan pelayanan sosial di lingkungan pemerintahan;
11. Bapak Merdi Parmanto, S.Kom selaku Kepala Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran beserta seluruh pegawai Desa Bagelen, terimakasih telah memberikan izin, bantuan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dan bermanfaat bagi semua pihak;
12. Masyarakat KPM keluarga PKH di Desa Bagelen, terimakasih sudah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini, sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
13. Kepada seluruh karyawan SPPG Dapur Merdeka Kecamatan Gedong Tataan, terimakasih atas kesempatan, bantuan, serta informasi yang sangat bermanfaat selama proses penelitian berlangsung. Dukungan dan kerja sama yang

diberikan sangat membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik;

14. Teristimewa buat kedua orang tuaku tercinta, Rudi Siswardi, S.Pd., M.M dan Infa Yurni terimakasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tanpa cinta, kesabaran, dan perjuangan kalian, penulis tidak akan mampu sampai pada tahap ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud kecil rasa terima kasih dan kebanggaan penulis kepada Ayah dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada keduanya;
15. Kepada kakak dan adikku tercinta, Rifa Detia Maharani, S.M dan Arifa Rizkia Nauliy, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan. Kebersamaan, perhatian, dan motivasi dari kalian sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan kecil bagi kita semua;
16. Sahabatku tersayang, Resti Damayanti, Aisyah Putri Nur Istiqomah, dan Yumna Miralita Hr terimakasih untuk dukungan kalian, untuk persahabatan yang luar biasa ini. Terimakasih telah menerimaku yang berbeda di antara kalian. Semoga persahabatan ini *stay until jannah*;
17. Teman-teman *family 100*, Diandra, Nasywa, Ala, Santa, Aulia Riris, Opra, Aga, Sanje terimakasih sudah hadir dalam hidupku dan memberikan tawa dan hiburan dikala penulis penat mengerjakan skripsi serta berbagai pengalaman hidup yang luar biasa;
18. Teman-temanku, Alvina Khairunisa, Rika Dwi Lestari, dan Astrid Cahyani Fitri yang telah membersamai penulis sedari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi, serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Semangat mengejar cita-cita kita bersama;
19. Teman-teman KKN Desa Sinar Karya Alda, Aqilah, Sabrina, Rica, Aldi, dan Ziddan terimakasih telah memberikan apa arti hidup yang sebenarnya. Terimakasih juga sudah mau sabar dan berjuang bersama melewati masa-masa

- KKN yang menyenangkan. Semoga tali silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik di masa yang akan datang;
20. Kepada rekan-rekan S1 Sosiologi Angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan;
 21. Kepada pemilik NPM 18021154 yang selalu menjadi support system penulis, terimakasih atas dukungan, semangat, motivasi, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaannya yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Semoga kita berdua dapat meraih kesuksesan di kemudian hari dan selalu kebersamaan di setiap keadaan.
 22. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih telah mampu bertahan hingga sejauh ini, meskipun sering diliputi rasa lelah, ragu, dan keinginan untuk menyerah. Perjalanan ini tidaklah mudah, dipenuhi dengan tekanan, kegelisahan, bahkan air mata, namun diri ini tetap berusaha untuk bangkit dan melanjutkan langkah, walaupun terkadang harus berjalan perlahan.. Saya bangga pada diri saya sendiri. Semoga seluruh lelah, kesedihan, dan perjuangan yang telah dilalui dapat berbuah manis pada waktu yang tepat, adapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan karya ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta semoga Tuhan membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026

Penulis,

Felia Nova Ramandha

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	7
2.1.1 Pengertian Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	7
2.1.2 Fungsi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	8
2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kesejahteraan	9
2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)	10
2.2.1. Pengertian Program Keluarga Harapan(PKH)	10
2.2.2 Sasaran dan Kriteria KPM PKH	11
2.2.3. Mekanisme Pelaksanaan PKH	15
2.2.4. Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2024.....	17
2.3 Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	20
2.3.1 Pengertian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	19
2.3.2 Mekanisme Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	21
2.3.3 Tujuan dan Filosofi Program	23
2.3.4 Persyaratan Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG).....	25
2.3.5 Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	25
2.3.6 Manajemen dan Tata Kelola Program MBG	26
2.3.7 Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	28
2.4 Landasan Teori.....	28
2.4.1 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.....	28
2.5 Penelitian Terdahulu	32
2.6 Kerangka Berpikir.....	35
III. METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	39

3.4	Informan Penelitian	39
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data	41
3.7	Teknik Analisis Data	43
3.8	Teknik Keabsahan Data	44
IV.	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	45
4.1	Gambaran Umum Desa Bagelen.....	45
4.1.1.	Sejarah Desa Bagelen	45
4.1.2	Letak Geografis dan Letak Wilayah.....	49
4.1.3	Penduduk Desa Bagelen	50
4.1.4	Kondisi Pemerintahan Desa Bagelen	53
4.1.5	Perkembangan Pendidikan Desa Bagelen	56
4.1.6	Perkembangan Ekonomi Pertanian Desa Bagelen.....	59
4.1.7	Perkembangan Sosial Budaya Desa Bagelen	59
4.1.8	Mata Pencaharian Penduduk Desa Bagelen	60
4.1.9	Tenaga Kerja Desa Bagelen	61
4.2	Gambaran Umum Program MBG di Desa Bagelen.....	63
4.2.1	Sejarah Program MBG di Desa Bagelen	63
4.2.2	Tugas dan Struktur Pengelola Program MBG.....	64
4.2.3	Struktur Alur Tata Kelola Program MBG.....	74
4.2.4	Jaminan Kualitas dan Kuantitas Makanan Program MBG.....	76
4.3	Gambaran Umum Program PKH di Desa Bagelen	83
4.3.1	Alur Pelaksanaan Program PKH Di Desa Bagelen	83
4.3.2	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Bagelen.....	84
4.3.3	Peran Pendamping PKH di Desa Bagelen	85
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	84
5.1	Profil Informan	84
5.2	Hasil Penelitian.....	91
5.2.1	Pelaksanaan Program MBG Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKH.....	92
5.2.2	Dampak Pelaksanaan Program MBG di Desa Bagelen Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKH	104
5.2.3	Kendala Pelaksanaan Program MBG Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKH.....	123
5.3	Pembahasan.....	139
5.3.1	Pelaksanaan Program MBG Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	139
5.3.2	Dampak Pelaksanaan Program MBG Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	144
5.3.2	Kendala Pelaksanaan Program MBG.....	148
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
6.1	Kesimpulan	131
6.2	Saran	153
	DAFTAR PUSTAKA	138
	LAMPIRAN.....	159

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung 2024	3
2.1 Besaran Bantuan Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)	18
2.2 Penelitian Terdahulu	32
3.1 Informan Penelitian.....	40
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia dan Jenis Kelamin di Desa Bagelen Tahun 2025	51
4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Jenis Kelamin di Desa Bagelen Tahun 2023-2025	52
4.3 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Bagelen Tahun 2022-2025	53
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Desa Bagelen Tahun 2025	56
4.5 Mata Pencaharian Pokok.....	60
4.6 Tenaga Kerja Berdasarkan Usia Penduduk.....	62
4.7 Kualitas Angkatan Kerja Berdasarkan Usia Penduduk.....	62
4.8 Struktur Pengorganisasian Pekerja SPPG Dapur Merdeka.....	73
4.9 Standar Gizi Program MBG di Desa Bagelen.....	78
5.1 Profil Informan.....	86
5.2 Hasil Observasi Pelaksanaan Program MBG Melalui	100
5.3 Hasil Observasi Dampak Pelaksanaan Program Melalui Teori AGIL.....	115
5.4 Hasil Observasi Kendala Pelaksanaan Program Melalui Teori AGIL.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Mekanisme Alur Penyiapan dan Penyaluran MBG	21
2.2 Lima Kunci Keamanan Pangan WHO	24
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	37
4.1 Arti Logo Desa Bagelen.....	48
4.2 Peta Wilayah Kecamatan Gedong Tataan.....	50
4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bagelen	55
4.4 Alur Tata Kelola Program MBG Kabupaten Pesawaran	76
4.5 Standar makanan ibu hamil dan menyusui untuk makan siang	79
4.6 Standar makanan balita untuk makan siang.....	80
4.7 Standar makanan siswa PAUD/TK untuk makan siang.....	80
4.8 Standar makanan siswa SD/MI Kelas 1-3 untuk makan siang	81
4.9 Standar makanan siswa SD/MI Kelas 4-6 untuk makan siang	81
4.10 Standar makanan siswa SMP/MTS untuk makan siang.....	82
4.11 Standar makanan siswa SMA/MA untuk makan siang.....	82
5.1 Diskusi Menu MBG dan Sosialisasi di Sekolah.....	92
5.2 Menu Makanan MBG	96
5.3 Menu Makanan MBG Tiba di sekolah Tepat Waktu	97
5.4 Pemanfaatan Menu MBG Kepada KPM Anak Sekolah.....	97
5.5 Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga	107
5.6 Kegiatan Siswa Setelah Menerima MBG	110
5.7 Aktivitas Siswa Saat Mengonsumsi MBG di Sekolah.....	112
5.8 Suasana Saat Mengonsumsi MBG di Sekolah.....	99
5.9 Kendala Dalam Pemorsian Menu Makanan MBG	125
5.10 Ahli Gizi Dalam Mengawasi Porsi dan Mutu Makanan MBG	123
5.11 Kendala Keterbatasan Bahan Menu Pada Proses Pemorsian.....	127
5.12 Keterlambatan Distribusi Menu MBG.....	126
5.13 Kegiatan Sosialisasi Kepada Orang Tua Tentang Gizi.....	128
5.14 Bentuk Pengawasan Langsung Dari Pemerintah.....	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Dokumentasi	159
2. Pedoman Wawancara	165
3. Daftar Keluarga Penerima Keluarga Manfaat (KPM) PKH Desa Bagelen	169

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan keluarga adalah salah satu indikator pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain tingkat pendapatan, kesejahteraan ditentukan oleh kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi, kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial (Badan Pusat Statistik, 2023). Salah satu tantangan kesejahteraan adalah kemiskinan terutama di wilayah pedesaan (World Bank, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih memerlukan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (Kementerian Sosial RI, 2023).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan (Kementerian Sosial RI, 2021). Program ini berupa bantuan tunai bersyarat yang diberikan yang diberikan secara berkala sampai jangka waktu tertentu. Melalui bantuan yang diberikan tersebut, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat meringankan beban keluarga berpenghasilan rendah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang (Kementerian Sosial RI, 2025). Walaupun demikian, dalam tataran praktiknya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih terdapat sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah pemanfaatan bantuan yang masih bersifat konsumtif serta belum sepenuhnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara

berkelanjutan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan bergizi padasebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih belum optimal, terutama untuk anak-anak usia sekolah. Keadaan ini berpotensi memengaruhi kesehatan, pertumbuhan, serta kemampuan belajar anak yang pada akhirnya memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga secara lebih komprehensif, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin (Kementerian Kesehatan RI, 2025). Kehadiran program MBG diharapkan mampu meningkatkan status gizi anak, mendukung proses belajar di sekolah, serta mengurangi beban pengeluaran penyediaan makanan bagi keluarga berpenghasilan rendah (Suadi dan Purmadani, 2025).

Dalam konteks keluarga penerima PKH, program MBG memiliki peran penting sebagai program pendukung yang dapat memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Jika Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada bantuan ekonomi dan akses layanan sosial, maka program MBG secara langsung menasar pemenuhan kebutuhan gizi yang menjadi dasar bagi kesehatan dan perkembangan anak. Dengan demikian, sinergi antara kedua program tersebut berpotensi memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Terkait bantuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran termasuk diantara daerah di Provinsi Lampung yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan atau masih banyak yang mendapatkan bantuan sosial PKH. Dari data BPS Tahun 2024 ditemukan bahwa jumlah kemiskinan di Provinsi Lampung mencapai

941,23 ribu jiwa yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Berikut data jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung tahun 2024.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung 2024

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung (Ribu Jiwa) Tahun 2024
Lampung Barat	33,43
Tanggamus	64,22
Lampung Selatan	132,38
Lampung Timur	142,70
Lampung Tengah	137,41
Lampung Utara	105,91
Way Kanan	48,88
Tulang Bawang	37,46
Pesawaran	55,01
Pringsewu	34,42
Mesuji	12,91
Tulang Bawang Barat	20,35
Pesisir Barat	20,22
Kota Bandar Lampung	83,88
Kota Metro	12,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat 55,01 ribu jiwa. penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran. Hal ini cukup besar sehingga menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Saat ini pemerintah sudah memberikan Program PKH dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan kedua program ini maka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima PKH.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius dalam melihat bagaimana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan kesejahteraan para penerima PKH di sejumlah wilayah, termasuk Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan data Desa Bagelen tahun 2024, hanya terdapat 285 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di wilayah ini. Mayoritas penduduk desa tersebut bekerja pada sektor

informal dengan pendapatan yang tidak stabil, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan bergizi (Indah Sari, 2022). Kondisi ini menjadikan Desa Bagelen sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana program bantuan sosial dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bagelen masih ditemukan beberapa permasalahan terkait kemiskinan atau pemenuhan gizi, seperti ketergantungan terhadap bantuan sosial, pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat terkait penerimaan bantuan. Oleh karena itu, keberadaan program MBG diharapkan dapat menjadi intervensi tambahan yang mampu memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan keluarga penerima PKH, sehingga perlu kajian terkait bagaimana program MBG dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga PKH.

Dari beberapa penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji mengenai program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Widyadhana (2025) menemukan bahwa program MBG dapat berkontribusi pada perbaikan status gizi masyarakat yang menjadi dasar peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu, Andriyanti R (2025) meneliti mengenai keberadaan program MBG berpotensi memberikan *multiplier effect* ekonomi melalui peningkatan permintaan pangan lokal sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas, termasuk kelompok miskin.

Sehingga perlu ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), mayoritas berfokus pada persoalan program MBG secara terpisah tanpa adanya kaitannya dengan program PKH. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji sinergi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga masih terbatas,

khususnya pada tingkat desa. Padahal, integrasi antara bantuan ekonomi dan intervensi gizi berpotensi memberikan dampak yang lebih komprehensif terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya celah yang penting untuk diteliti lebih lanjut dalam perspektif sosiologis bagaimana pelaksanaan program MBG dalam mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima PKH, termasuk dampak yang ditimbulkan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peningkatan Kesejahteraan Keluarga PKH Melalui Program MBG di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yang diterjemahkan menjadi satu pertanyaan umum, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program MBG dalam peningkatan kesejahteraan keluarga PKH di Desa Bagelen?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan program MBG dalam peningkatan kesejahteraan keluarga PKH di Desa Bagelen?
3. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan program MBG dalam peningkatan kesejahteraan keluarga PKH di Desa Bagelen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diutarakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan program MBG dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Bagelen
2. Menganalisis dampak program MBG dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Bagelen.
3. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program MBG dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Bagelen.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya kajian ilmu sosiologi, khususnya pada bidang sosiologi pembangunan dan sosiologi keluarga. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai upaya peningkatan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui integrasi bantuan sosial bersyarat dengan intervensi pemenuhan gizi, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam penerapan teori struktural fungsional Talcott Parsons (AGIL) dalam menganalisis sinergi antar program pemerintah dalam sistem kesejahteraan sosial.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi bagi peneliti, akademis, maupun pemerintah.

1. Bagi Kementerian Sosial, diharapkan perlu memperkuat sinergi antara Program PKH dan Program MBG agar kedua program dapat saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan kualitas hidup KPM.
2. Bagi pengelola program MBG, diharapkan dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, sehingga KPM tidak hanya menjadi penerima bantuan tetapi juga ikut mendukung keberhasilan program secara aktif.
3. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai program sosial dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

2.1.1 Pengertian Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokok kehidupan dengan layak, contohnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal yang memadai. Menurut Yulianti (2013:38) kesejahteraan selain diukur dari seberapa besar pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menunjang kualitas hidup anggota keluarga. Dengan demikian, indikator kesejahteraan keluarga menurut Chalid (2014:150) meliputi:

1. Pendapatan
2. Konsumsi Pengeluaran
3. Pendidikan
4. Perumahan
5. Kesehatan

Di Indonesia, konsep peningkatan kesejahteraan keluarga juga dijelaskan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk ikatan pernikahan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual yang layak, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang serasi, harmonis, dan seimbang antar anggota keluarga serta dengan masyarakat sekitar (BKKBN, 2017). Definisi ini

menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga mencakup berbagai dimensi seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta hubungan sosial.

Konsep peningkatan kesejahteraan dalam penelitian ini difokuskan dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memenuhi kebutuhan gizi anak yang berfungsi untuk mengurangi berbagai isu kesehatan terkait dengan kekurangan gizi anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan seperti stunting, anemia, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu, melainkan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan (Suharto, 2009). Dengan demikian, program MBG dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam aspek ekonomi dan kesehatan.

2.1.2 Fungsi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Fungsi peningkatan kesejahteraan keluarga menurut Fahrudin (2012:12) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan berperan untuk mendorong individu, keluarga, serta masyarakat agar terhindar dari masalah sosial yang hendak muncul. Pada masyarakat ketika mengalami perubahan, upaya pencegahan lebih diutamakan dengan aktivitas yang mendorong terbentuknya pola interaksi sosial serta institusi sosial yang baru.

2. Fungsi Penyembuhan

Kesejahteraan sosial bertujuan dapat mengatasi berbagai keadaan yang menghambat, termasuk keterbatasan fisik, emosional, dan sosial sehingga individu ketika menghadapi kesulitan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal ditengah masyarakat. Keadaan ini bisa disebut dengan proses pemulihan atau rehabilitasi.

3. Fungsi Pengembangan

Fungsi dari kesejahteraan sosial ini sebagai keikutsertaan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan serta peningkatan struktur serta sumber daya sosial.

4. Fungsi Penunjang

Peran ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan agar mencapai tepat sasaran didalam sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kesejahteraan

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan menurut Iskandar (2010:53), yaitu:

1. Komposisi Umur Penduduk

Terdapat indikator lain yang digunakan dalam menilai kesejahteraan masyarakat suatu negara, yang tidak semata-mata didasarkan pada aspek pendapatan sangat bervariasi. Salah satu indikator tersebut yaitu angka harapan hidup.

2. Distribusi Pendapatan Masyarakat

Penilaian kesejahteraan penduduk tidak dapat hanya dilihat dari besarnya pendapatan per kapita semata, namun juga harus mempertimbangkan bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara masyarakat. Pengalaman pembangunan di negara maju telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya cenderung diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan. Sebaliknya, di negara berkembang, proses pembangunan sering kali justru diiringi dengan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata.

3. Pola Pengeluaran Masyarakat

Alokasi pengeluaran masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.

4. Komposisi Pendapatan Nasional

Dua kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita yang sama dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan yang berbeda apabila struktur komposisi produksi nasionalnya tidak sama. Suatu masyarakat cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapitanya apabila porsi pendapatan nasional yang dialokasikan untuk pengeluaran pertahanan serta pembentukan modal lebih besar dibandingkan dengan negara lain yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang setara.

5. Perbedaan Masa Lapang

Ketidaksempurnaan penggunaan pendapatan per kapita sebagai indikator pembandingan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh adanya perbedaan dalam jumlah waktu luang yang dimiliki oleh setiap individu. Peningkatan pendapatan per kapita cenderung berkorelasi negatif dengan ketersediaan waktu luang. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya dapat tercapai apabila terdapat keseimbangan antara pendapatan dan waktu luang yang dimiliki masyarakat.

6. Keadaan Pengangguran

Di samping menaikkan tingkat pendapatan masyarakat, tujuan penting lain dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan kesempatan kerja, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bukan saja harus sanggup mengurangi tingkat pengangguran.

2.2 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.2.1. Pengertian Program Keluarga Harapan(PKH)

Berdasarkan Pasal 3 Permensos Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipahami sebagai program bantuan sosial yang menyalurkan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi persyaratan tertentu. Secara internasional, program ini dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Persyaratan

tersebut umumnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban di bidang pendidikan maupun kesehatan, seperti kehadiran di sekolah atau pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, pemerintah Indonesia melalui PKH berupaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sebagai program yang berbasis persyaratan, PKH memberikan kesempatan bagi keluarga kurang mampu, ibu hamil, dan anak-anak untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan serta fasilitas pendidikan di lingkungan sekitar. Selain itu, PKH juga mencakup perhatian terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia guna menjaga kesejahteraan sosial mereka, sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial (PKH, 2007).

2.2.2 Sasaran dan Kriteria KPM PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada individu maupun keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH. Adapun kriteria kepesertaan dalam PKH mencakup beberapa komponen utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap komponen penerima manfaat PKH memiliki rincian yang berbeda-beda (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024).

Selanjutnya, dalam buku Panduan Umum PKH (2019:19–20) dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis layanan yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM), yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Kesehatan

Sasaran peserta dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen kesehatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan layanan kesehatan, meliputi beberapa kategori berikut:

a. Ibu Hamil dan Ibu Nifas

- (1) Selama masa kehamilan, ibu diwajibkan melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yang terdiri dari satu kali pada trimester pertama (0–3 bulan), satu kali pada trimester kedua (4–6 bulan), dan dua kali pada trimester ketiga (7–9 bulan), serta memperoleh suplemen tablet Fe.
- (2) Proses persalinan harus dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Ibu pada masa nifas diwajibkan menjalani pemeriksaan serta memperoleh pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan minimal sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada minggu pertama, minggu keempat, dan minggu keenam.

b. Anak Usia 0-6 Tahun

- (1) Bayi usia 0–28 hari (neonatus) wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebanyak tiga kali.
- (2) Bayi usia 0–11 bulan harus memperoleh seluruh imunisasi yang dibutuhkan (BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B), serta berat badannya perlu dipantau melalui penimbangan rutin setiap bulan.
- (3) Anak usia 5–6 tahun juga perlu ditimbang berat badannya secara berkala setiap bulan, disertai pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, anak dapat mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD) apabila tersedia fasilitas PAUD di lokasi atau posyandu terdekat.

2. Komponen Pendidikan

Sasaran kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya pada komponen pendidikan, menetapkan bahwa tingkat kehadiran peserta didik di lembaga pendidikan minimal harus mencapai 85% dari total hari sekolah dalam satu bulan selama satu tahun ajaran.

Ketentuan ini disertai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Apabila dalam suatu keluarga terdapat anak berusia 5–6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar atau sederajat, maka anak tersebut wajib memenuhi ketentuan pendidikan.
- b. Anak yang berusia 7–15 tahun dan termasuk peserta PKH diwajibkan terdaftar di lembaga pendidikan seperti SD/MI/SDLB/Paket A maupun SMP/MTs/SMLB atau SMP/MTs Terbuka).
- c. Jika terdapat anak berusia 15–18 tahun yang belum menamatkan pendidikan dasar, maka orang tua peserta PKH berkewajiban mendaftarkan anak tersebut ke lembaga pendidikan yang menyediakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- d. Apabila anak belum memiliki kemampuan membaca dan menulis, maka mereka diwajibkan mengikuti program keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
- e. Jika anak sudah bekerja dan tergolong sebagai pekerja anak atau telah lama tidak bersekolah, maka datanya harus didaftarkan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota untuk memperoleh Program Pengurangan Pekerja Anak.
- f. Apabila anak hidup di jalanan atau dikenal sebagai anak jalanan dan sudah lama tidak mengenyam pendidikan, maka datanya juga perlu didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota agar dapat memperoleh Program Kesejahteraan Sosial Anak.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Sasaran kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Komponen Kesejahteraan Sosial meliputi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Lansia berusia 70 Tahun atau lebih
 - (1) Individu dan/atau keluarga yang termasuk dalam kelompok lanjut usia yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK), baik tinggal bersama keluarga maupun terdaftar sendiri dalam KK.
 - (2) Pemeriksaan kesehatan bagi lansia dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau dengan mendatangi puskesmas apabila fasilitas tersebut tersedia.
 - (3) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti layanan *day care*.

- b. Penyandang Disabilitas
 - (1) Individu dan/atau keluarga dengan kondisi disabilitas yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK), baik tinggal bersama keluarga maupun tercatat secara mandiri dalam KK.
 - (2) Perawatan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan
 - (3) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*).

Selain itu, dalam petunjuk teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia (2024) dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tidak diperkenankan untuk:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
3. Memiliki status sebagai pensiunan ASN atau TNI/POLRI yang menerima dana pensiun;
4. Memiliki status sebagai pendamping sosial;
5. Memiliki status sebagai guru yang telah tersertifikasi;
6. Memiliki penghasilan tetap yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah;

7. Terdaftar sebagai pemilik CV atau sebagai direksi/komisaris dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan HAM; dan/atau.
8. Mempunyai penghasilan yang melebihi upah minimum kabupaten/kota.

2.2.3. Mekanisme Pelaksanaan PKH

Dalam mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), proses penyaluran bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, khususnya Pasal 37 ayat (1), serta pedoman teknis antara lain:

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial PKH

Proses pembukaan rekening menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Bank Penyalur. Kegiatan ini dilakukan secara kolektif oleh Bank Penyalur, diawali dengan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah disampaikan oleh Kemensos. Selanjutnya, dilakukan pencetakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berdasarkan data yang diterima dari Kemensos sesuai dengan Berita Serah Terima, setelah rekening bantuan sosial berhasil dibuka.

2. Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH bersama pelaksana Program Keluarga Harapan bagi para penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial dan Bank Penyalur memberikan sosialisasi serta edukasi kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selain itu, Bank Penyalur juga menyampaikan informasi kepada pelaksana PKH di tingkat wilayah, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dan/atau Pendamping Sosial, pemerintah kecamatan, serta pemerintah kelurahan/desa.

3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan bantuan Pendamping Sosial. Penerima bantuan sosial

PKH harus mengaktifkan kartu yang diterima. Bank penyalur wajib melaporkan kartu yang belum didistribusikan kepada Kementerian Sosial dalam waktu 30 hari setelah rekening dibuka. Tanggung jawab dalam distribusi KKS mencakup Dinas Sosial, Bank Penyalur, serta Pendamping Sosial PKH. Koordinator ditingkat Kabupaten/Kota membantu kepala dinas dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH).

4. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur yang menyalurkan dana langsung ke rekening penerima bantuan yang telah terdaftar. Adapun ketentuan penyalurannya pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur dan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan.
- b. Dana bantuan dipindahkan dari rekening pemberi bantuan sosial PKH di bank penyalur ke rekening penerima dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah dana ditransfer dari kas negara atau kas daerah. Proses penyaluran ini tidak dikenakan biaya kepada penerima bantuan sosial PKH.

5. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH

Penarikan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Bank Penyalur serta agen yang ditunjuk seperti Bank Penyalur, Kemensos, Dinas Sosial Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terlibat. Koordinasi antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi memastikan kesiapan untuk penyaluran berjalan lancar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya penerima manfaat memiliki opsi untuk melakukan penarikan dana Program Keluarga Harapan (PKH) melalui berbagai transaksi (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di *e-warong*²², agen bank, maupun Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Apabila di suatu wilayah belum

tersedia fasilitas penyaluran secara non-tunai, maka penyaluran dilakukan melalui sistem titik pembayaran yang telah disetujui antara Dinas Sosial dan Bank Penyalur.

6. Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan di setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan yang ada. Proses rekonsiliasi ini dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat pusat.

7. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Pemantauan dilakukan agar menilai keberhasilan maupun kendala dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan tersebut secara rutin dilaksanakan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial. Laporan yang disampaikan meliputi pembukaan rekening secara kolektif beserta nomor rekening penerima, proses pemindahan dana dari rekening penyelenggara ke rekening penerima, serta rekapitulasi realisasi penyaluran dana PKH (berdasarkan jumlah KPM serta nominal) setiap bulan maupun sesuai kebutuhan. Pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, instansi terkait seperti Kementerian Sosial dan Dinas Sosial juga melakukan penilaian terhadap penyaluran dana serta kemudahan akses KPM terhadap e-warong, agen bank, ATM, dan kantor cabang bank.

2.2.4. Indeks Bantuan Sosial PKH Tahun 2024

Menurut Dinas Sosial PPPA Kabupaten Banjarnegara (2024), biasanya kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) ini umumnya terfokus hanya pada keluarga yang kehidupannya serba kekurangan, dengan prioritas khusus diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil/nifas, anak-anak sekolah (SD, SMP,SMA/Sederajat), penyandang disabilitas berat, serta lanjut usia. Syaratnya, penerima manfaat wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dan datanya tercatat dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diganti menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tabel 2.1 Besaran Bantuan Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp) / 3 bulan
1.	Ibu hamil/menyusui	Rp 750.000, per 3 bulan
2.	Anak usia 0-6 tahun	Rp 750.000, per 3 bulan
3.	Peserta pendidikan setara SD/Sederajat	Rp 225.000, per 3 bulan
4.	Peserta pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp 375.000, per 3 bulan
5.	Peserta pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp 500.000, per 3 bulan
6.	Penyandang disabilitas berat	Rp 600.000, per 3 bulan
7.	Lansia 60 tahun ke atas	Rp 600.000, per 3 bulan

Sumber: *Kementerian Sosial RI tahun 2024*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah bantuan pada setiap komponen memiliki besaran yang berbeda. Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan sekali. Apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan yang melebihi batas maksimal, atau terdapat anggota keluarga yang memenuhi lebih dari tiga komponen penerima, maka bantuan yang diberikan hanya dibatasi pada tiga komponen saja. Sementara itu, jika tidak ada anggota keluarga yang memenuhi kriteria tersebut (Kesehatan, Pendidikan, atau Kesejahteraan sosial) maka mereka tidak dapat terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Bahkan jika sebelumnya memang memenuhi komponen tersebut, tetapi kemudian salah satu komponen tersebut hilang (seperti anak sudah yang sudah menyelesaikan pendidikan, atau ibu tidak hamil lagi, atau ada anggota lansia atau disabilitas meninggal), maka bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dihentikan (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018).

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018, penyaluran bantuan dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun

dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua pada bulan April, tahap ketiga pada bulan Juli, dan tahap keempat pada bulan Oktober. Ketentuan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun penentuan jadwal penyaluran di setiap kecamatan diatur oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPKH) ditingkat Kabupaten/Kota setelah bekerjasama melalui lembaga pembayaran. Dana bantuan disalurkan secara langsung kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lembaga pembayaran yang bisa diakses menggunakan kartu debit yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) wajib memastikan bahwa data pada Kartu Peserta PKH sesuai dengan identitas pada KTP saat proses pencairan bantuan berlangsung.

2.3 Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

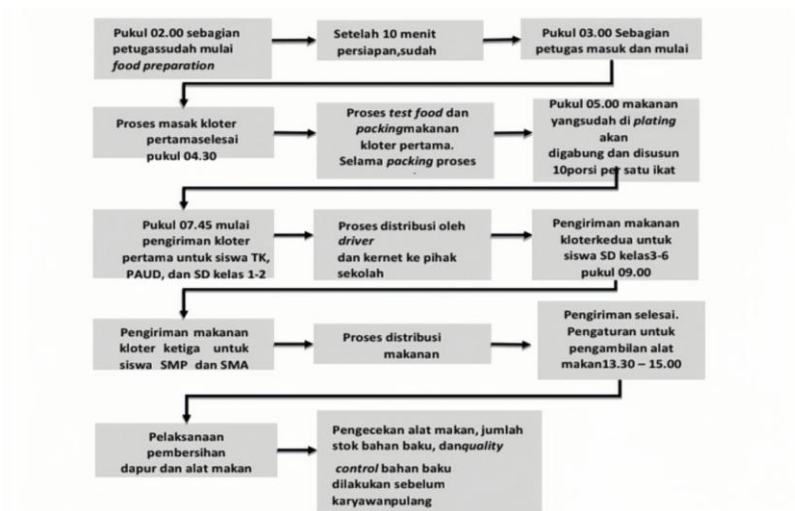
2.3.1 Pengertian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan yang dirancang oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa tanpa dipungut biaya, dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesehatan dan motivasi belajar mereka. Sasaran utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah anak-anak, pelajar, dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa di Indonesia mengalami kelaparan saat mengikuti proses pembelajaran, yang berdampak buruk pada konsentrasi dan prestasi akademik mereka. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk meningkatkan asupan gizi siswa, mengurangi angka stunting, serta mengatasi masalah gizi buruk di kalangan anak-anak, sekaligus mendorong motivasi serta partisipasi aktif dalam kegiatan belajar (Merlinda & Yusmar Yusuf, 2025). Pelaksanaan program makan siang gratis di sekolah dapat

diterapkan melalui berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya meliputi pemberian makan siang gratis secara menyeluruh, program-program yang ditargetkan, inisiatif yang direncanakan oleh pemerintah, serta program yang dipimpin oleh masyarakat setempat dan sukarelawan. Pemberian makan siang gratis bagi seluruh siswa yang memenuhi kriteria bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah serta mengurangi kerawanan pangan (Turner, dkk. 2019; Zuercher, dkk.2024 dalam Desiani & Syafiq, 2025).

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik di Sekolah Dasar, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan prestasi belajar dan produktivitas jangka panjang. Namun, dalam proses implementasinya, terdapat sejumlah tantangan yang telah disorot oleh beberapa pihak, baik dari kalangan akademisi, pengamat kebijakan, media massa, maupun lembaga pengawasan. Berdasarkan sintesis literatur yang dikaji, tantangan utama program MBG dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu tantangan terkait sumber daya dan tantangan terkait struktur birokrasi dan koordinasi. Salah satu tantangan krusial adalah kecukupan dan efektivitas pengalokasian sumber daya, khususnya dari segi anggaran. Menurut analisis World Bank (2022), anggaran yang terlalu rendah akan menyulitkan penyediaan makanan dengan kualitas gizi yang memadai, terutama jika memperhitungkan inflasi harga bahan pokok, variasi biaya antar daerah, serta ongkos logistik. Selain itu, jika anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal, maka terdapat potensi ketimpangan antara daerah satu dengan lain, yang berdampak pada ketidakadilan dalam pelaksanaan.

2.3.2 Mekanisme Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)



Gambar 1. Mekanisme Alur Penyiapan dan Penyaluran MBG
(Sumber: Juknis Program MBG Tahun 2025)

Berdasarkan petunjuk teknis program MBG (2025) mengenai mekanisme alur penyiapan dan penyaluran MBG dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Program MBG dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita.
- b. Proses pengolahan makanan dilakukan paling lambat 46 jam sebelum kegiatan makan bersama di sekolah.
- c. Waktu persiapan dimulai pada pukul 02.00 WIB dengan kegiatan persiapan bahan makanan (*food preparation*), pukul 03.00 WIB dimulai proses memasak.
- d. Rangkaian waktu persiapan dan distribusi MBG adalah sebagai berikut:
 - Pukul 02.00 dimulai persiapan bahan makanan (*food preparation*)
 - Pukul 02.15 dimulai memasak nasi untuk tahap pertama
 - Pukul 03.00 dimulai memasak lauk untuk tahap pertama
 - Pukul 05.00 dimulai memasak nasi dan lauk untuk tahap kedua
 - Pada pukul 07.00 mulai dilakukan proses memasak nasi dan lauk untuk tahap ketiga.

- Pada pukul 05.00–06.30 dilaksanakan uji rasa (test food), proses pendinginan, serta pemorsian makanan untuk tahap pertama.
 - Pada pukul 07.00–08.30 dilakukan kegiatan uji rasa, pendinginan, dan pembagian porsi untuk tahap kedua.
 - Pada pukul 08.30–10.00 dilaksanakan uji rasa, pendinginan, serta pemorsian makanan untuk tahap ketiga.
 - Pada pukul 07.30 dilakukan pendistribusian tahap pertama yang ditujukan kepada TK, PAUD, dan siswa SD kelas 1–3.
 - Pukul 09.00 dilaksanakan distribusi tahap kedua bagi siswa SD kelas 4–6.
 - Pada pukul 10.30 dilakukan distribusi tahap ketiga yang diperuntukkan bagi siswa SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita.
 - Pada pukul 13.00–15.00 dilakukan penarikan kembali peralatan makan.
- e. Apabila proses distribusi MBG dilakukan dalam dua tahap, maka kegiatan persiapan dimulai pada pukul 04.00.
- f. Jika distribusi MBG hanya dilakukan dalam satu tahap, maka persiapan dilakukan pukul 06.00.
- g. Hal utama yang perlu diperhatikan yaitu makanan yang sudah dimasak jangan berada di luar batas aman konsumsi, karena harus dikonsumsi maksimal 4 jam sesudah dimasak.
- h. Sebelum didistribusikan, makanan yang akan disajikan wajib melalui pemeriksaan kualitas serta keamanan pangan secara fisik, meliputi warna, rasa, dan aroma oleh pihak penyedia atau juru masak. Setelah itu, pemeriksaan kembali dilakukan oleh pihak sekolah saat makanan tiba.
- i. MBG disajikan menggunakan wadah makan (ompreg) yang dalam kondisi baik, bersih, dan aman. Ketentuan ini berlaku juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita.
- j. Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita dilakukan melalui kerjasama dengan kader posyandu dan kader KB setempat.

- k. Peserta didik diwajibkan membawa sendiri alat makan seperti sendok dan garpu dari rumah setiap hari pelaksanaan makan bersama.
- l. Selain itu, peserta didik juga diminta membawa air minum dari rumah setiap hari.

2.3.3 Tujuan dan Filosofi Program

Laporan dari Indonesia Business Post menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak sekolah dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan serta prestasi belajar. Sasaran program MBG meliputi anak usia dini, peserta didik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, santri di pesantren, serta ibu hamil dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 82,9 juta jiwa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah upaya penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah dan pesantren yang bertujuan memperbaiki asupan gizi peserta didik (Sitanggang dkk., 2024 dalam Andin et al., 2024). Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan tercipta pemerataan kesempatan proses pembelajaran karena seluruh siswa memperoleh akses yang sama terhadap makanan bergizi. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang ekonomi dan sosial (Karomahd kk., 2024 dalam Andin et al., 2024).

Menurut Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sekitar 25% anak di Indonesia belum memperoleh asupan makanan bergizi setiap hari. Program ini dirancang untuk menanggulangi persoalan kelaparan dengan menjangkau seluruh anak tanpa memandang latar belakang kondisi ekonomi. Dalam kerangka Percepatan Penurunan Stunting (PPS), strategi nasional program ini mengacu pada faktor penentu gizi anak, penyebab utama malnutrisi, serta konteks yang memengaruhi masalah gizi di Indonesia (CISDI, 2024 dalam Andin et al., 2024).

2.3.4 Persyaratan Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG)

Berdasarkan petunjuk teknis Program MBG tahun 2025, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian MBG kepada siswa, yaitu sebagai berikut:

- a. Terdiri dalam bentuk menu lengkap yang mengacu pada prinsip gizi seimbang serta ditujukan untuk menggantikan salah satu waktu makan utama, yaitu sarapan atau makan siang.
- b. Menu lengkap MBG harus memenuhi prinsip gizi seimbang sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan, yang mencakup makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah-buahan.
- c. Menu yang disediakan wajib memenuhi angka kecukupan gizi harian berdasarkan kelompok usia sasaran, yaitu sebesar 20–25% untuk sarapan atau 30–35% untuk makan siang.
- d. Untuk paket menu MBG diberikan tiap satu kali waktu makan.
- e. Mutu dan keamanan pangan harus terjamin dengan menerapkan lima kunci keamanan pangan.



Gambar 2.2 Lima Kunci Keamanan Pangan WHO

(Sumber: Juknis Program MBG Tahun 2025)

2.3.5 Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan siswa dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Rif'iy Qomarullah dan rekan-rekannya pada tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada angka stunting dan malnutrisi di sekolah swasta yang telah menjalankan program Asupan Gizi Baik (AGB) selama lebih dari lima tahun (Qomarullah et al.,2025). Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menemukan bahwa siswa yang mengikuti program AGB cenderung lebih aktif, baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun aktivitas ekstrakurikuler. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Grantham McGregor dan rekan-rekannya (2007) sebagaimana dikutip dalam Qomarullah et al. (2025), yang menyatakan bahwa kecukupan asupan gizi pada anak berpengaruh positif terhadap perkembangan kognitif serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dalam proses belajar. Dengan demikian, program MBG berpotensi memberikan dampak tidak hanya pada peningkatan kesehatan fisik siswa tetapi juga pada kesiapan mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Khusna Yulinda Udhiyanasari sebagaimana dikutip dalam Merlinda dan Yusmar Yusuf (2025b) menegaskan bahwa asupan makanan gizi memiliki peran penting dalam menunjang konsentrasi belajar, terutama bagi anak-anak yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa yang melewatkan sarapan atau mengonsumsi makanan dengan komposisi gizi yang tidak seimbang cenderung sulit konsentrasi lebih mudah merasa mengantuk. Sebaliknya, siswa yang terbiasa mengonsumsi sarapan dengan gizi seimbang memperlihatkan peningkatan kemampuan fokus serta respon yang lebih optimal selama kegiatan belajar berlangsung. Selain itu, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa kekurangan asupan gizi dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan otak anak. Anak-anak yang sering mengonsumsi makanan tinggi lemak, jenuh dan gula berisiko

mengalami penurunan daya ingat serta kemampuan belajar. Kondisi ini terjadi karena kadar glukosa dalam makanan tersebut dapat mempengaruhi metabolisme otak, yang pada akhirnya menyebabkan anak mudah merasa lelah dan kehilangan konsentrasi (Merlinda & Yusmar Yusuf,2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar siswa secara berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang baik dapat menurunkan risiko stunting dan malnutrisi, sekaligus mendorong siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Kecukupan gizi juga berperan penting dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan konsentrasi, serta memperkuat daya ingat anak. Sebaliknya, kekurangan gizi atau pola makan anak yang tidak seimbang dapat berdampak negatif pada fungsi otak dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, pelaksanaan program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik siswa tetapi juga mendukung kesiapan dan optimalisasi proses pembelajaran di sekolah.

2.3.6 Manajemen dan Tata Kelola Program MBG

Pada 15 Agustus 2024, Presiden Jokowi telah mengukuhkan Badan Nasional Gizi melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas program penyediaan makanan bergizi secara gratis. Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, yang terdiri dari Kepala Badan gizi Nasional serta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam struktur pelaksanaannya terdapat berbagai posisi penting, seperti kepala, wakil kepala, sekretariat utama, serta sejumlah deputi yang bertugas dalam berbagai bidang , antara lain sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan, termasuk pula inspektorat utama (Salim, 2024 dalam Andin et al.,2024).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sebanyak 85 satuan pelayanan telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap satuan pelayanan tersebut dirancang untuk melayani sekitar 3.000 anak sekolah penerima manfaat. Keberadaan satuan pelayanan ini memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan dapur umum, karena tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga menjadi tempat pengolahan pangan dengan memanfaatkan hasil pertanian lokal (Andin et al., 2024b).

2.3.7 Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

1. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) Program MBG tahun 2025, kelompok penerima manfaat meliputi:
 - a. Anak balita
 - b. PAUD/TK/RA
 - c. SD/MI
 - d. SMP/MTS
 - e. SMA/MA/SMK
 - f. SLB
 - g. Santri
 - h. Pendidikan khusus
 - i. Ibu hamil
 - j. Ibu menyusui
2. Calon penerima manfaat didata kemudian diinventarisasi oleh Penerima Bantuan (Yayasan) bersama Kepala SPPG dengan mempertimbangkan aspek geospasial serta durasi distribusi makanan dari SPPG ke lokasi penerima yang dibatasi maksimal 20 menit. Setelah itu, penetapan penerima manfaat dilakukan oleh pihak yayasan sebagai penerima bantuan.
3. Penerima manfaat harus terdata lengkap berdasarkan nama dan alamat. Program MBG diberikan dengan ketentuan:

- a. Tercatat sebagai penerima manfaat oleh Yayasan atau dapur SPPG sesuai wilayah layanan;
 - b. Program dilaksanakan pada hari sekolah, yaitu Senin sampai Jumat dengan maksimal lima hari dalam seminggu, serta tidak diberikan pada hari libur sekolah;
 - c. Pelaksanaan program berlangsung selama dapur SPPG beroperasi.
4. Kecuali pada bulan puasa, penerima manfaat memperoleh menu khusus yaitu makanan kering yang tidak cepat basi. Pembagian dilakukan menjelang waktu pulang sekolah dan dikemas menggunakan kantong *totebag* tanpa menggunakan *foodtray*.
 5. Penerima manfaat wajib dipantau perkembangan status gizinya secara berkala setiap enam bulan lewat pengukuran tinggi badan, berat badan, serta cara penilaian kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Juknis Program MBG, 2025).

2.4 Landasan Teori

2.4.1 Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Dalam kerangka berpikir struktural fungsional, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis, terdiri dari berbagai komponen atau substansi yang saling berhubungan. Prinsip teori Talcott Parsons menyatakan bahwa tindakan manusia itu diarahkan pada tujuan. Selain itu, tindakan tersebut berlangsung dalam situasi dengan unsur yang sudah ditentukan, sedangkan unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan (Parson, 1951). Teori struktural fungsional didasarkan pada kenyataan alam yang hidup secara teratur dengan adanya suatu sistem tanpa munculnya ketidakteraturan, contohnya matahari yang terbit di timur serta terbenam di barat. Selain itu, teori ini turut dipengaruhi oleh pandangan biologis yang memandang masyarakat sebagai organisme hidup yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bergantung. Dengan demikian, tujuan

utama teori struktural fungsional adalah terciptanya keteraturan sosial (Ritzer, 2012; Parsons, 1951).

Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons kemudian diperkaya oleh pemikiran sosiolog Eropa, sehingga menjadikannya bersifat empiris, positivistik, dan idealistik. Teori ini berasumsi bahwa perilaku manusia bersifat sukarela, yakni didasarkan pada keinginan individu dengan mempertimbangkan nilai, gagasan, serta norma yang disepakati bersama. Setiap individu mempunyai kebebasan dalam menentukan cara maupun strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sedangkan pilihan tindakan disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku (Parsons, 1937; Ritzer, 2014). Daripada itu, Parsons menjelaskan bahwa tindakan terjadi dalam situasi yang sebagian elemennya telah pasti, sementara elemen lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, tindakan dipandang sebagai unit dasar realitas sosial yang terdiri atas tujuan, alat, situasi, dan norma. Individu sebagai pelaku menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan alat yang tersedia, serta dipengaruhi oleh kondisi yang membimbingnya dalam memilih tujuan berdasarkan nilai, ide, dan norma.

Menurut Talcott Parsons dalam karyanya *The Social System* (1951), teori struktural fungsional menegaskan suatu sistem sosial hanya dapat bertahan apabila setiap elemen dalam masyarakat menjalankan perannya secara maksimal. Parsons kemudian mengemukakan konsep AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) sebagai empat fungsi utama yang harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial agar tetap stabil. Jika dikaitkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui program MBG di Desa Bagelen, maka konsep AGIL tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. *Adaptation* (Adaptasi)

KPM mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang terbatas melalui pemanfaatan bantuan PKH dan program MBG secara tepat. Bantuan PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, sedangkan program MBG dimanfaatkan untuk membantu pemenuhan gizi keluarga khususnya anak sekolah. Dengan adanya program tersebut, beban pengeluaran rumah tangga menjadi berkurang sehingga keluarga dapat mempertahankan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik. Sebagian KPM belum mampu beradaptasi secara optimal terhadap kondisi ekonomi yang dihadapi. Bantuan PKH terkadang digunakan untuk kebutuhan di luar pendidikan dan kesehatan, sementara makanan bergizi dari program MBG kurang dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, masih terdapat keluarga yang bergantung penuh pada bantuan pemerintah tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

2. *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Pencapaian tujuan dalam Program PKH dan MBG dapat dikatakan baik apabila program mampu membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi anak sehingga kesejahteraan keluarga meningkat dan pengeluaran rumah tangga menjadi lebih ringan. Selain itu, meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemenuhan gizi serta meningkatnya kesehatan dan semangat belajar anak juga menunjukkan bahwa tujuan program telah tercapai. Namun, pencapaian tujuan dapat dikatakan tidak baik apabila masih terdapat KPM yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara optimal, kualitas dan porsi makanan bergizi belum sesuai kebutuhan anak sehingga bantuan yang diberikan belum maksimal.

3. *Integration* (Integrasi)

Dalam konteks penelitian ini, integrasi yang baik tercermin dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping PKH, pelaksana program MBG, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memberikan edukasi dan pengawasan. Sebaliknya, integrasi yang tidak baik ditunjukkan melalui kurangnya koordinasi antar pelaksana program, komunikasi yang tidak berjalan efektif, serta munculnya kecemburuan sosial di masyarakat akibat pembagian bantuan yang dianggap tidak merata. Selain itu, rendahnya partisipasi orang tua dalam mendukung program juga dapat memperhambat tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan KPM.

4. *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Dalam aspek pemeliharaan pola, program PKH dan program MBG berjalan baik apabila keluarga mampu mempertahankan kebiasaan hidup sehat, pemenuhan gizi, serta perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan anak secara berkelanjutan. Sebaliknya, *latency* tidak berjalan baik apabila keluarga hanya bergantung pada bantuan program dan tidak mempertahankan kebiasaan positif setelah bantuan diberikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai dan kebiasaan positif yang tertanam secara berkelanjutan dalam kehidupan KPM.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Parsons menekankan adanya hierarki yang tersusun secara jelas, mulai dari tingkat paling rendah hingga tingkat tertinggi (Parsons, 1951; Ritzer & Goodman, 2014). Pada tingkat yang lebih rendah menyediakan kebutuhan bagi tingkat yang lebih tinggi, sedangkan teori struktural fungsional Talcott Parsons memandang bahwa masyarakat cenderung menuju keseimbangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan fungsi sosial, dan adanya struktur sosial yang menjaga kondisi tetap stabil.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal dan skripsi. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan beberapa hasil studi sebelumnya, di antaranya:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rif'iy Qomarullah (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBG memiliki potensi dalam menekan angka stunting dan malnutrisi pada anak usia sekolah, sekaligus meningkatkan tingkat kehadiran siswa serta hasil belajar mereka. Di samping itu, program ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya penyediaan pangan bergizi secara berkelanjutan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan pendanaan, ketersediaan bahan pangan lokal, serta sistem distribusi yang belum optimal sehingga	Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima PKH melalui pengintegrasian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini selain menilai efektivitas PKH semata, tetapi juga mengkaji bagaimana MBG berperan sebagai penguat program tersebut, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan peningkatan kualitas kesehatan keluarga. Di sisi lain, studi-studi sebelumnya cenderung menitikberatkan pada fungsi MBG dalam mengurangi ketimpangan gizi, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menekan angka putus sekolah akibat keterbatasan akses pangan bergizi. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dampak jangka panjang

		memerlukan perbaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.	pelaksanaan MBG terhadap kondisi kesehatan serta keberlanjutan pendidikan peserta didik.
2.	Nur Putri Aprilia (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara <i>legacy project</i> dan solusi stunting.	Penelitian menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program penanganan stunting, tetapi juga sebagai <i>legacy project</i> dengan implikasi politik yang kuat. Adapun berbagai tantangan yang muncul mencakup belum optimalnya standar kebersihan dapur, potensi inefisiensi atau pemborosan anggaran, serta kurangnya kesiapan dalam pelaksanaan program.	Kebaruan penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga PKH melalui pelaksanaan MBG dengan menggunakan perspektif teori struktural fungsional (AGIL). Berbeda dengan penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada analisis kebijakan dan efektivitas program dalam mengatasi permasalahan stunting serta posisinya sebagai <i>legacy project</i> pemerintah. Kajian tersebut umumnya melihat dampak program pada tingkat makro tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi KPM.
3.	Anifatul Kiftiyah (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial Politik.	Penelitian ini menunjukkan untuk menilai sejauh mana program tersebut telah tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam implementasi sila kelima, serta mengkaji pelaksanaannya dari perspektif dinamika sosial dan politik.	Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi program pada level lokal yakni menilai kontribusi MBG terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima PKH di Desa Bagelen. Penelitian ini menggunakan data primer (wawancara dengan KPM, pendamping, aparat desa, observasi lapangan dan dokumen lokal) untuk menganalisis dampak

			<p>MBG pada indikator kesejahteraan rumah tangga serta hambatannya. Sedangkan itu, penelitian terdahulu bersifat konseptual dan sintesis literatur sehingga fokusnya pada pemahaman implikasi kebijakan MBG secara luas dan rekomendasi pada level kebijakan.</p>
4.	<p>Narhiandini Mitresna Widyadhana (2025). Tinjauan Nilai Gizi Dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI</p>	<p>Penelitian mengungkapkan bahwa secara keseluruhan program MBG memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemenuhan gizi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Meskipun demikian, keberhasilan program ini sangat bergantung pada adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis data, serta dukungan koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.</p>	<p>Kebaruan pada penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek gizi tetapi juga melihat peran MBG sebagai program pendukung PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara sosial dan ekonomi, khususnya pada konteks lokal di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus terhadap kajian nilai gizi dan efektivitas Program MBG pada analisis komposisi menu, kandungan gizi, serta tantangan implementasi program dari perspektif kesehatan masyarakat.</p>
5.	<p>Kevin Andreas Halomoan Tambunan (2025). Tinjauan Kritis Tentang Program Makan Bergizi Gratis</p>	<p>Penelitian ini menguraikan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Program Makan Bergizi di SMK Negeri 6 Medan selama tahap uji</p>	<p>Kebaruan penelitian ini menempatkan keluarga sebagai unit analisis dengan pendekatan kesejahteraan sosial dan ekonomi rumah tangga, serta melibatkan peran pemerintah desa dan pendamping PKH.</p>

	Terhadap Produktivitas Belajar Siswa.	coba, sekaligus menilai dampaknya terhadap hasil belajar siswa serta berbagai tantangan yang muncul dalam proses implementasinya. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan tingkat kehadiran siswa dan membantu pemenuhan kebutuhan gizi mereka, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.	Sementara pada penelitian terdahulu menempatkan siswa sebagai analisis utama dengan konteks pelaksanaan program di lingkungan sekolah serta menitikberatkan pada aspek kehadiran dan proses belajar siswa.
--	---------------------------------------	---	--

Sumber : *Jurnal Ilmiah Tahun 2025*

2.6 Kerangka Berpikir

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kondisi gizi sekaligus kesejahteraan keluarga, terutama bagi keluarga yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan distribusi, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta perbedaan tingkat pemahaman dan partisipasi keluarga PKH terhadap program tersebut.

Dalam penelitian ini, Program MBG dianalisis dengan menempatkan keluarga PKH sebagai unit sosial paling dasar yang mempunyai peran strategis dalam menentukan keberhasilan program. Keluarga tidak semata-mata diposisikan sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai subjek aktif yang memengaruhi bagaimana program tersebut diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak bergantung pada penyedia layanan tetapi juga bagaimana keluarga PKH merespons, menerima, dan memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Analisis penelitian ini menggunakan Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons melalui skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integratation, dan Latency*). Keberhasilan program MBG terlihat dari fungsi *adaptation* mampu menyesuaikan diri dengan program seperti menerima pola konsumsi makanan bergizi yang disediakan. Fungsi *goal attainment* berkaitan dengan peningkatan status gizi dan kesejahteraan keluarga. Fungsi *integratation* mencerminkan adanya koordinasi antara pihak penyelenggara program, pemerintah desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, fungsi *latency* berkaitan bagaimana nilai hidup sehat dan pola makan bergizi dapat dipertahankan dalam keluarga PKH secara berkelanjutan.

Keluarga penerima PKH, sebagai unsur dalam sistem sosial, memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program MBG. Interaksi antara anggota keluarga, tingkat pengetahuan gizi, serta lingkungan sosial sangat memengaruhi efektivitas program. Ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut dapat menimbulkan permasalahan, seperti kurang optimalnya pemanfaatan program, rendahnya perubahan pola konsumsi, serta belum tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan suatu kerangka berpikir untuk menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam menganalisis proses Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai suatu peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Pesawaran. Adapun kerangka berpikir tersebut disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu memaparkan atau menjelaskan secara rinci sesuai dengan kenyataan di lapangan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan program MBG. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program MBG, kendala, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis bagaimana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Fokus penelitian diarahkan pada keterkaitan antara intervensi program MBG dengan kondisi kesejahteraan keluarga, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan, dampaknya terhadap pemenuhan gizi, serta identifikasi kendala yang mempengaruhi optimalisasi hasil

program. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran program MBG sebagai upaya pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga PKH, sekaligus menilai efektivitas pelaksanaannya di tingkat desa.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Alasan pemilihan lokasi ini karena tingginya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta sebagian besar masyarakat miskin masih mengharapkan bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan intervensi sosial melalui program bantuan masih cukup signifikan. Selain itu, Desa Bagelen merupakan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan program MBG yang ditujukan bagi keluarga penerima PKH. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung dari bulan Maret hingga Januari 2026, dengan tahapan kegiatan meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi guna memperoleh data yang akurat.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data mengenai situasi serta kondisi yang menjadi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa individu yang dipilih memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, *purposive sampling* merupakan metode penentuan informan yang dipilih karena memiliki pengetahuan yang memadai serta mampu memberikan penjelasan yang

akurat terkait objek penelitian. (Creswell & Poth, 2018). Berikut adalah beberapa kriteria informan, yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama Informan	Indikator
1.	Informan Kunci	Merdi Parmanto, S.Kom	Kepala Desa Bagelen
2.	Informan Utama	Lady Aprilia, A.Md.Gz.	Ahli Gizi MBG
3.	Informan Utama	Pipit Febriana Zaini, S.S	Pendamping PKH
4.	Informan Utama	1. Suparmi Yanti (ortu) 2. Rafi Surya Saputra (anak) 3. Okriana Dewi (ortu) 4. Faisal Ramadhan (anak) 5. Mut Mainah (ortu) 6. Faiz Al- Farizi (anak) 7. Lastri (ortu) 8. Yusuf Al Muis (anak) 9. Soleha (ortu) 10. Herlangga Kurniawan (anak) 11. Lilis Sumarni (ortu) 12. Ba'da Dila Safitri (anak) 13. Mut Mainah (ortu) 14. Farel Firmansyah (anak) 15. Dwi Sulastri (ortu) 16. Sukaesih Putri (anak) 17. Siti Aisyah (ortu) 18. Amelia Febiola (anak)	Masyarakat/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima MBG

Sumber : Diolah oleh peneliti (2026)

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yakni data yang bersifat deskriptif dan tidak bisa diukur dengan angka. Sementara itu, jenis dan sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, observasi, serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi penanggung jawab Program MBG di Desa Bagelen sebagai informan utama, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlibat dalam proses pelaksanaan program, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan, serta Kepala Desa Bagelen yang memberikan informasi terkait kondisi desa yang sebenarnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada umumnya diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen, literatur, buku, serta arsip perusahaan (Sugiyono, 2009:137). Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi berupa foto, buku, gambar, profil wilayah, serta jurnal yang diperoleh dari penanggung jawab Program MBG Desa Bagelen, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kepala Desa Bagelen. Data tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat hasil analisis, memberikan dasar teoritis, serta menjadi pembanding antara temuan di lapangan dengan hasil penelitian sebelumnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat krusial dalam suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh informasi dari berbagai sumber yang relevan. Oleh sebab itu, proses pengumpulan data dapat dilakukan dalam beragam situasi sosial dengan mempertimbangkan berbagai sumber data serta metode yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2017). Untuk mempermudah proses pengumpulan data di lapangan, penulis menerapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan objek secara teliti serta mencatat temuan secara terstruktur. Melalui pengamatan langsung di lapangan, peneliti dapat memperoleh data yang nyata dan bersumber langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung di Desa Bagelen, serta di SPPG Dapur Merdeka Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Peneliti mengamati proses distribusi makanan, mekanisme pemorsian, serta kondisi nyata penerima manfaat, khususnya keluarga PKH. Melalui observasi, peneliti dapat melihat kesesuaian antara standar program dengan praktik yang terjadi, termasuk kendala seperti keterbatasan bahan, ketepatan sasaran, dan pola konsumsi yang diterima keluarga. Dengan demikian, observasi memberikan gambaran faktual dan objektif terkait implementasi program.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan maksud tertentu. Kegiatan ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan dua narasumber sebagai pihak yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Tujuannya dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait persepsi, dan penilaian informan terhadap efektivitas program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui wawancara, peneliti juga dapat mengidentifikasi berbagai kendala, harapan, serta bentuk adaptasi yang dilakukan oleh keluarga PKH dalam menghadapi keterbatasan program.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen resmi program, seperti petunjuk teknis pelaksanaan MBG dan program PKH, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, foto kegiatan, serta catatan

administrasi lainnya. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti pendukung yang dapat meningkatkan validitas data, sekaligus membantu peneliti dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan program.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menafsirkan data yang telah diperoleh. Tujuan dari analisis data untuk mencapai pemahaman secara menyeluruh dari informasi yang telah diperoleh dari penelitian oleh peneliti. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan yang berlangsung secara simultan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap pertama dalam metode analisis data kualitatif, dikarenakan ada banyak informasi yang didapat dari survei lapangan. Setelah itu digabungkan menjadi satu bagian dan merangkum semua masalah yang teridentifikasi di lapangan secara detail. Reduksi data melibatkan proses merangkum, memilah, dan memfokuskan pada aspek yang paling signifikan, serta mencari tema utama sekaligus menyederhanakan data yang didapatkan dari lapangan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data dalam metode ini dapat berupa ringkasan deskriptif, bagan, maupun hubungan antar kategori, Dalam tahap penyajian ini, peneliti mengelompokkan atau mengkategorikan data tersebut ke dalam penggolongan tertentu setelah data tersebut diperoleh di lokasi penelitian kemudian diberi tanda khusus. Melalui proses tersebut, pengelompokan data berperan penting dalam membantu peneliti membedakan informasi

yang bersifat utama dan yang kurang relevan, sehingga data yang telah diperoleh dapat diklasifikasikan secara lebih sistematis.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau proses verifikasi dilakukan setelah kedua tahapan sebelumnya diselesaikan, sehingga penulis dapat mengidentifikasi serta menemukan berbagai permasalahan yang muncul di lokasi penelitian. Pada tahap penarikan kesimpulan ini, peneliti menyusun catatan mengenai keteraturan, pola penjelasan, hubungan sebab akibat, proposisi, serta konfigurasi. Setelah itu, data yang dihasilkan menjadi data yang valid dan akurat untuk dituliskan dalam bagian kesimpulan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik diterapkan dengan cara mencocokkan dan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang berasal dari berbagai pihak, seperti perangkat desa, pendamping PKH, pengelola Program MBG, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Proses perbandingan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi data terkait bentuk pelaksanaan, dampak, serta kendala Program MBG di tingkat desa.

IV.GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Bagelen

4.1.1. Sejarah Desa Bagelen

Desa Bagelen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa ini terbentuk karena peristiwa Transmigrasi di Hindia Belanda yang memindahkan penduduk dari Purworejo, Jawa Tengah ke beberapa daerah di pulau Sumatra. Desa ini didirikan oleh transmigrasi asal Bagelen, Purworejo yang tiba di daerah ini pada tahun 1900-an. Desa ini merupakan desa transmigrasi pertama di Indonesia. Desa ini dibentuk pada tahun 1905. Pemberian nama Bagelen persis seperti nama wilayah Kabupaten Purworejo yang menjadi bagian dari Keresidenan Kedu. Pemberian nama ini dilakukan untuk mengobati rindu pada transmigran dengan daerah asalnya. Alasan lainnya agar mereka merasakan ueforia berada di Jawa meskipun telah pindah (Swasono, 1986; Saroso, 2014).

Penempatan mereka di wilayah Pulau Sumatera, khususnya di wilayah Provinsi Lampung saat ini dan Keresidenan Lampung pada saat itu merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melemahkan perlawanan terhadap penjajahan, Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menguntungkan pihak Belanda karena memungkinkan mereka memperoleh tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di Perkebunan yang berada di bawah kekuasaan mereka di wilayah Sumatera (Swasono, 1986;

Saroso, 2014, Nabu, Smith, & Josep, 2018). Keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi pertama tahun 1905, mendorong pemerintah untuk terus memindahkan masyarakat etnis Jawa ke Pulau Sumatera terutama ke wilayah Lampung. Menurut sumber yang dikeluarkan oleh Museum Nasional Ketransmigran, dalam rentang waktu 1905 sampai dengan tahun 1943, sekitar 51.000 kepala keluarga yang berasal dari Pulau Jawa dipindahkan dari Keresidenan Lampung (Provinsi Lampung pada saat itu). Saat ini, keturunan para transmigran dari Pulau Jawa tersebut telah tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Lampung, diantaranya Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, dan Kota Metro (Swasono, 1986; Saroso, 2014; Nabu, Smith, & Josep, 2018).

Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda dibawah kepemimpinan Gubernur Jenderal ke-63, yaitu Johannes Benedictus van Heutsz (1904-1909) melaksanakan program kolonisasi dengan memberangkatkan penduduk sejumlah 155 Kartu Keluarga (KK) dari Keresidenan Kedu Jawa Tengah menggunakan kapal uap. Keresidenan Kedu dipilih karena pada saat itu kondisinya sangat memprihatinkan. Selain itu, keadaan tersebut menyebabkan kelaparan, kondisi para petani yang miskin, serta kurangnya akses lahan (*mindere welvaart*). Kolonisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Mereka dipindahkan ke wilayah Gedong Tataan, Lampung. Daerah Gedong Tataan dipilih karena letaknya tidak jauh dari Pelabuhan, tanahnya datar, banyak sumber air sehingga baik untuk pembukaan sawah baru (M. Amral Sjamsu, 1956:18). Gedong Tataan terletak sekitar 20 km kearah Selatan dari pusat Kota Bandar Lampung.

Para transmigran yang berasal dari Pulau Jawa memperoleh berbagai bentuk perbekalan sebelum menetap di daerah tujuan. Bantuan tersebut tidak hanya berupa bahan pangan seperti beras, jagung, dan minyak, tetapi juga tempat tinggal sementara berupa rumah bedeng beratap seng atau asbes. Selain itu, mereka dibekali perlengkapan rumah tangga dan alat kerja, seperti sabit, cangkul, sekop, piring, mangkuk, kursi, dan meja

(Saroso, 2014). Meskipun demikian, keterbatasan yang dimiliki para keluarga transmigran menuntut mereka untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dengan membuka lahan yang pada saat itu masih berupa hutan. Proses pembukaan lahan dilakukan dengan cara sederhana, yakni menebang pepohonan menggunakan sabit serta bola besi berukuran besar.

Migrasi yang berlangsung secara terus menerus, ditambah dengan pertumbuhan penduduk akibat angka kelahiran, menyebabkan jumlah penduduk di wilayah Bagelen semakin meningkat. Pada masa awal perkembangannya, Desa Bagelen dikenal sebagai wilayah bercorak agraris yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain, padi, singkong, jagung, dan kelapa (Swasono,1986). Secara topografis, wilayah ini memiliki tanah yang subur serta hutan yang baik, sehingga menarik minat pendatang untuk bermigrasi. Selain bertani dan berladang, sebagian masyarakat juga menggantungkan hidup pada sektor peternakan.

Setelah sampai, akhirnya mereka menempati tempat baru yang diberi nama sesuai dengan asal desa mereka di Jawa, yaitu Bagelen. Mereka sebagian besar berasal dari Desa Bagelen, Purworejo, Karesidenan Kedu. Pada waktu itu, Bagelen masih hutan lebat dengan pohon-pohon yang sangat besar, wilayah Bagelen lalu dibuka atau istilah jawanya “dibabat” oleh para transmigran serta pemerintah dengan bola besi besar untuk dibuat lahan pemukiman dan pertanian. Bola besi tersebut menjadi bukti dari sejarah kolonisasi yang hingga kini masih terpajang di Museum Transmigrasi Lampung yang terletak di Kabupaten Pesawaran (Swasono,1986).



Gambar 3. 1 Arti Logo Desa Bagelen

1. BAGELEN (tulisan hitam dan putih) : Keteguhan dan keikhlasan
2. Cincin Mas Serangkai : Kerukunan, kekeluargaan yang indah
3. Telundakan 5 (tangga) : Tipe atau tingkat desa (swadaya, swakarya, swasembada pancasila / desa religious, desa wisata/teladan)
4. Padi dan Kapas : Masyarakat harus Makmur
5. Rumah Joglo : Bagelen desa kolonisasi pertama tahun 1905
6. Perisai bambu kuning runcing 6 buah : Masyarakat berjuang berlandaskan iman dan taqwa
7. Pelita berujung 5 : Pedoman hidup berdasarkan Pancasila
8. Sinar Pelita 45 : Semangat berjuang 1945 / proklamasi
9. Siger : Bagelen berada di bumi Lampung

Sumber: Data Desa Bagelen (2025)

Desa Bagelen merupakan salah satu lokasi awal program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda yang dijadikan wilayah percontohan kolonisasi (*Kolonisatieproof*) berdasarkan kajian H.G. Heyting. Program ini sepenuhnya dibiayai pemerintah, dengan memberikan bantuan kepada setiap kepala keluarga berupa bahan makanan selama satu tahun, perlengkapan rumah tangga, rumah, serta lahan (70 are sawah dan 30 are pekarangan), disertai transportasi gratis dan jaminan hidup selama dua tahun. Pada tahun 1910, para kolonis telah mampu membangun penggilingan padi untuk

mendukung pertanian. Selanjutnya, pada tahun 1911 dilakukan gelombang kedua perpindahan penduduk sebagai bagian dari percobaan lanjutan, yang juga mencakup pemindahan penduduk Jawa ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi setelah percobaan awal dinilai cukup berhasil (Pratiwi et.al.,2019).

Perkembangan Desa Bagelen pada masa kolonial terjadi di berbagai bidang. Dalam sektor transportasi, dibangun jalan utama yang menghubungkan desa dengan Pelabuhan Tanjung Karang sepanjang sekitar 25 km, sehingga mempermudah mobilitas dan distribusi. Di bidang kesehatan, didirikan lembaga Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Sementara itu, sektor pendidikan lebih difokuskan pada penyediaan tenaga kerja lokal, seperti pegawai rendahan dan buruh perkebunan. Pada bidang keuangan, didirikan Lampongsche Bank sebagai lembaga perkreditan bagi kolonis, namun bank ini dilikuidasi pada tahun 1928 akibat manajemen yang kurang baik. Di sektor pertanian, terjadi peningkatan luas sawah basah hingga mencapai sekitar 700 ha pada tahun 1916. Selain perkembangan tersebut, Desa Bagelen juga mengalami konflik sosial antara pendatang dan masyarakat asli yang dipicu oleh kecemburuan sosial. Pemerintah kolonial kemudian berupaya meredam konflik dengan memperbaiki sistem administrasi desa melalui penerapan sistem marga. Pada periode 1928–1931, arus migrasi ke wilayah Lampung meningkat dan berlangsung secara rutin setiap tahun, dengan sekitar 1.000 orang datang secara mandiri tanpa bantuan pemerintah (Halwi & Dahlan, 2014).

4.1.2 Letak Geografis dan Letak Wilayah

Berdasarkan data Desa Bagelen (2025), wilayah desa ini memiliki luas total sekitar 412,25 hektare dan didominasi oleh penggunaan lahan untuk sektor pertanian. Terdiri dari tanah sawah seluas 242,50 ha/m², tanah kering seluas 111,75 ha/m², tanah perkebunan 46 ha/m² perorangan, tanah tegal/peladangan seluas 86,75 ha/m², tanah permukiman 25 ha/m², tanah pemakaman / perkuburan seluas 1 ha/m², tanah lapangan olahraga seluas 1 ha/m², tanah untuk jalan seluas 3 ha/m², tanah untuk sungai seluas 3 ha/m²,

dan tanah untuk kolam ikan seluas 5 ha/m². Secara keseluruhan, komposisi penggunaan lahan tersebut menunjukkan bahwa Desa Bagelen memiliki karakter wilayah agraris dengan dukungan fasilitas dasar bagi kebutuhan masyarakat.



Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Gedong Tataan

(Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Gedong Tataan tahun 2007)

Berdasarkan peta tersebut, Desa Bagelen berbatasan langsung dengan Desa Karang Anyar di bagian utara, Desa Kebagusan di sebelah timur, Desa Kutuarjo di bagian barat, serta Desa Sukaraja di sebelah selatan. Secara geografis, Desa Bagelen memiliki suhu rata-rata sekitar 30°C. Total panjang jalan di desa ini mencapai 41 km, yang terdiri atas 10 km jalan desa, 3 km jalan kabupaten, dan 27 km jalan provinsi. Selain itu, Desa Bagelen memiliki sejumlah infrastruktur jembatan, yaitu jembatan beton dengan kondisi 1 unit baik dan 6 unit mengalami kerusakan. Di samping itu, terdapat pula 1 jembatan kayu yang masih dalam kondisi baik. Karakteristik tanah di Desa Bagelen didominasi oleh warna merah dengan tekstur lempung (Desa Bagelen, 2025).

4.1.3 Penduduk Desa Bagelen

Menurut Mantra (2000) ada tiga faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk disuatu daerah, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga faktor ini merupakan faktor penentu dalam menentukan tinggi atau rendahnya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau daerah.

Berdasarkan data Desa Bagelen (2025), diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Bagelen yaitu berjumlah 7.887 jiwa. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, data desa menunjukkan bahwa terdapat 3.759 jiwa penduduk laki-laki, 4.128 jiwa penduduk perempuan dan terdapat jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.182 KK.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia dan Jenis Kelamin di Desa Bagelen Tahun 2025

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 - 12 bulan	169	256	425
2.	13 bulan- tahun	351	326	677
3.	5 - 6 tahun	224	108	332
4.	7 - 12 tahun	413	468	881
5.	13 -15 tahun	288	297	585
6.	16-18 tahun	283	309	592
7.	19-25 tahun	506	651	1.157
8.	26-35 tahun	680	701	1.381
9.	36-45 tahun	216	248	464
10.	45-50 tahun	109	172	281
11.	51-60 tahun	214	283	497
12.	61-75 tahun	188	164	352
13.	>76 tahun	118	145	263
JUMLAH		3.759	4.128	7.887

Sumber: Data Desa Bagelen (2025)

Berdasarkan data yang diperoleh, struktur penduduk di Desa Bagelen menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih mendominasi dibandingkan laki-laki pada hampir seluruh kelompok usia. Distribusi penduduk berdasarkan usia juga tidak merata, dengan konsentrasi terbesar berada pada kelompok usia produktif, khususnya 26–35 tahun, yang menandakan potensi tenaga kerja yang cukup besar. Sementara itu, kelompok usia 46–50 tahun menjadi yang paling sedikit jumlahnya. Selain itu, sejak usia dini hingga dewasa muda, kecenderungan dominasi perempuan sudah terlihat, baik pada kelompok balita maupun usia 19–25 tahun. Secara keseluruhan, komposisi ini menggambarkan bahwa Desa

Bagelen memiliki struktur penduduk yang didominasi perempuan dan terkonsentrasi pada usia produktif (Data Desa Bagelen, 2025).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Jenis Kelamin di Desa Bagelen Tahun 2023-2025

Nama Dusun	2023		Total	2024		Total	2025		Total
	L	P		L	P		L	P	
Dusun 1	204	170	374	505	513	1.018	505	512	1.017
Dusun 2	262	246	508	727	737	1.464	716	735	1.451
Dusun 3	290	279	569	815	725	1.540	811	722	2.468
Dusun 4	283	254	537	490	468	958	488	464	952
Dusun 5	223	180	403	1.041	973	2.014	1.038	971	2.009
Total	1.262	1.129	2.391	3.578	3.416	6.994	3.558	3.404	6.962

Sumber: Data Desa Bagelen (2025)

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Bagelen tahun 2023-2025, jumlah penduduk menunjukkan perkembangan yang bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat secara signifikan, terutama dari tahun 2023 ke 2024. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan pada setiap tahun. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan dusun, pertumbuhan penduduk terjadi relatif merata di seluruh wilayah, meskipun terdapat perbedaan jumlah antar dusun, dengan Dusun 5 menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk yang lebih besar di dusun tertentu, namun secara umum distribusi penduduk tetap tersebar di seluruh dusun di Desa Bagelen (Data Desa Bagelen, 2025).

Namun pada tahun 2025 menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terjadi sedikit penurunan pada menjadi 6.962 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk relatif seimbang, namun jumlah laki-laki tetap lebih dominan dibandingkan perempuan. Pola ini juga

konsisten di seluruh dusun, di mana laki-laki cenderung lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, distribusi penduduk berdasarkan dusun dan jenis kelamin dapat dikatakan stabil, dengan keseimbangan yang tetap terjaga meskipun terdapat sedikit perbedaan jumlah antar jenis kelamin (Data Desa Bagelen, 2025).

4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa Bagelen

Menurut Data Desa Bagelen (2025) agar kegiatan pemerintahan berjalan lancar Kepala Desa dibantu oleh para aparat dalam pekerjaannya. Struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 3 Kepala Seksi, 3 Aparatur Urusan, 5 Kepala Dusun, 24 Ketua RT, 12 pegawai desa lainnya seperti Hansip 10 dan Operator 2, sebagai yang menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Adapun jumlah aparat pemerintah desa yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin tahun 2022-2025 disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

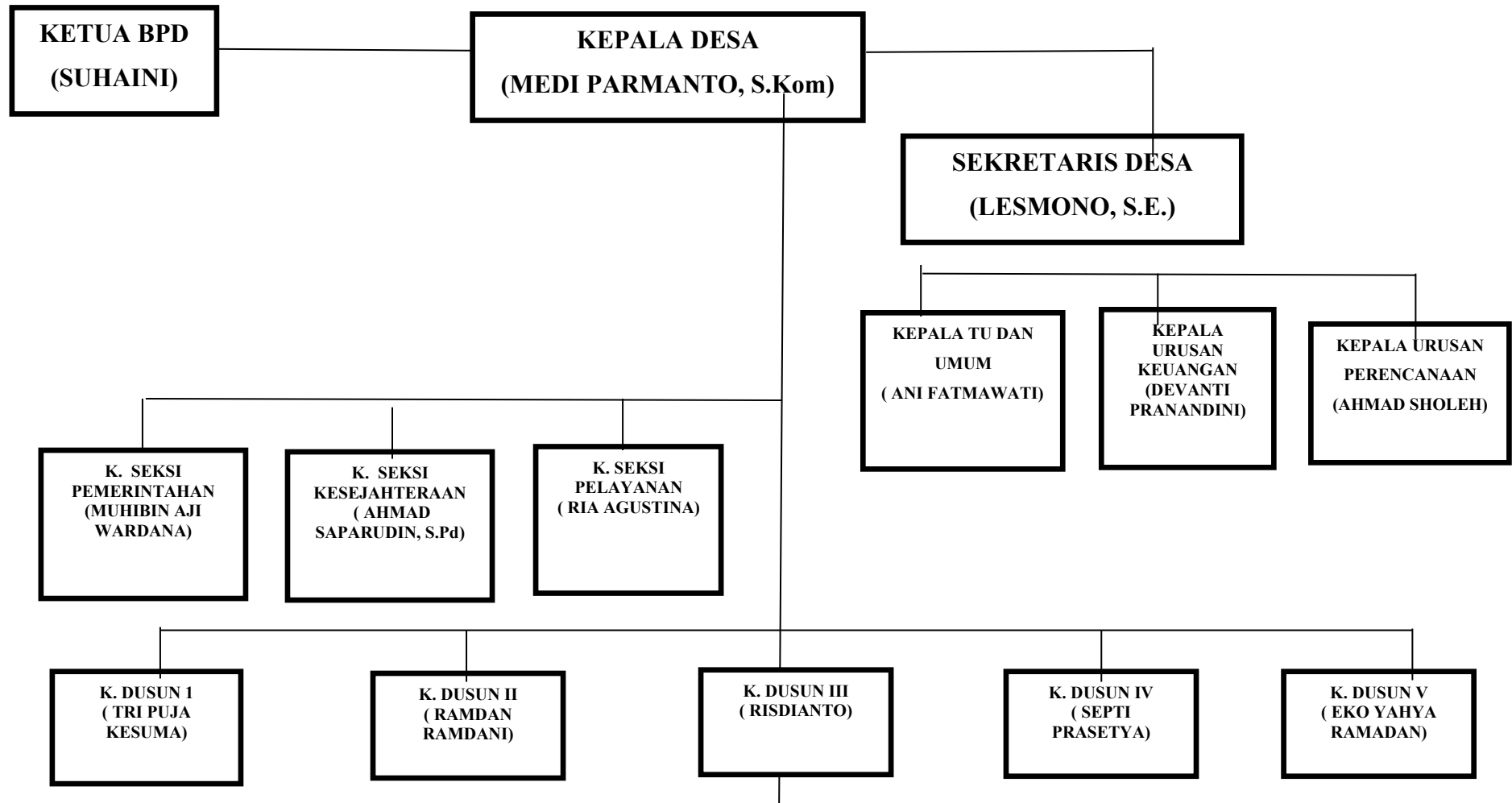
Tabel 4. 3 Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Bagelen Tahun 2022-2025

	2022		2023		2024		2025					
	L	P	L	P	L	P	L	P				
Kepala Desa	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
Sekretaris	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
Pelaksana Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepala Seksi (KASI)	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
Kepala Urusan (KAUR)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Pelaksana Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepala Dusun (KADUS)	4	1	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
Rukun Tetangga (RT)	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	4		4	4		4	4		4	4		4
Linmas	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
BPD	7	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2	9
Total	4	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	9	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5

Sumber : Data Desa Bagelen (2025)

Dari jumlah dan sebaran aparatur desa pada Tabel 4.3, terlihat bahwa jumlah aparatur desa telah diisi sesuai dengan alokasi dan peran perempuan dalam sektor pemerintahan juga telah dilibatkan. Hal ini terlihat pada jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun, anggota BPD bahkan Ketua RT telah diisi oleh perempuan. Selain itu, Desa Bagelen juga telah memiliki 1 kantor kepala desa atau biasa disebut juga dengan balai desa (Desa Bagelen, 2025).

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bagelen



4.1.5 Perkembangan Pendidikan Desa Bagelen

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pembentukan dan pengembangan kemampuan individu yang tercermin dalam perilaku serta sikap yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, pendidikan juga dapat dipahami sebagai suatu proses sosial di mana individu dipengaruhi oleh lingkungan yang terarah, seperti lembaga sekolah, sehingga mampu memahami kehidupan sosial serta mengembangkan potensi dirinya (Siti Meichati,1980:6). Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pendidikan menjadi hal yang sangat penting guna mendukung kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat dalam rangka pengembangan suatu wilayah.

1. Minat Masyarakat Terhadap Pendidikan di Desa Bagelen

Perkembangan pendidikan di Desa Bagelen dapat diukur melalui jumlah penduduk yang berhasil menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal. Hal ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Desa Bagelen Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	Laki- Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	85	93
Usia 3-6 tahun yang sedang TK / playgroup	114	95
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	712	836
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	-	-
Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	14	19
Usia 18-56 tidak tamat SLTP	61	52
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	42	31
Tamat SD / sederajat	200	180
Tamat SMP / sederajat	220	280
Tamat SMA / sederajat	315	295
Tamat D-1 / sederajat	34	46
Tamat D-2 / sederajat	21	19
Tamat D-3 / sederajat	26	11
Tamat S-1 / sederajat	39	44
Tamat S-2 / sederajat	6	8

Tamat S-3 / sederajat	1	-
Tamat SLBA	-	-
Tamat SLBB	-	-
Tamat SLBC	-	-
Jumlah Total	1.890	2.012

Sumber: Data Desa Bagelen (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4.4 tersebut, jumlah penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan di Desa Bagelen menunjukkan struktur yang beragam dengan dominasi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Lulusan SMA menjadi kelompok terbesar, diikuti oleh lulusan SMP dan SD, yang menandakan bahwa sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan pendidikan formal hingga jenjang menengah. Meskipun masih terdapat sebagian kecil penduduk usia dewasa yang belum menamatkan pendidikan dasar dan menengah, jumlahnya relatif lebih sedikit. Di sisi lain, keberadaan lulusan perguruan tinggi (D1 hingga S1) meskipun belum banyak, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan akses terhadap pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan tren positif dalam pencapaian pendidikan masyarakat Desa Bagelen yang semakin baik (Data Desa Bagelen, 2025)

Kondisi tersebut juga menggambarkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar dan menengah sudah cukup baik, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan tinggi masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Hal ini penting mengingat pendidikan yang lebih tinggi akan berpengaruh terhadap keterampilan, serta daya saing masyarakat Desa Bagelen di masa depan.

Di desa Bagelen telah diadakan beberapa kegiatan pendidikan mental seperti kreatifitas dari masyarakat itu sendiri untuk mengadakan pengajian atau yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid maupun di mushola dan pengajian yasinan bergilir bagi yang beragama islam. Lain dari pada itu seperti pada penganut agama katolik dan protestan juga giat sesuai dengan agama yang dianutnya. Pengajian anak-anak atau TPA

juga terbentuk antara lain: 1) TPA Hidayatusibyan, 2) TPA Nashihus Sholihin, 3) TPA Asiddiqiyah, 4) TPA AL Ikhlas, 5) TPA Asrotul Jannah, 6) TPA AL Mutaqin, 7) TPA Roudhotul Jannah, 8) TPA Araudoh, dan 9) TPA Hikmatul Umah (Data Desa Bagelen, 2025).

2. Keadaan Pendidikan Sekolah di Desa Bagelen

Pada sekitar tahun 1905, didirikan *Bagelen School* melalui kebijakan Menteri Kewedanaan sebagai tahap awal pengembangan pendidikan di wilayah tersebut. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak kolonis atau transmigran, dengan fokus pada pemberian pendidikan dasar di bidang pertanian. Pendirian sekolah ini bertujuan agar anak-anak para transmigran memperoleh pendidikan yang lebih baik sekaligus meningkatkan kecerdasan mereka. Kemudian, pada tahun 1910, didirikan sekolah desa di Desa Bagelen, Lampung, yang juga memberikan pendidikan dasar khususnya dalam keterampilan bercocok tanam bagi anak-anak kolonis (Yuliyani, Kurniawan, & Hendratama, 2022).

Pada periode diatas, perkembangan pendidikan mulai menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada awalnya, sekitar tahun 1911, lembaga pendidikan hanya didirikan di wilayah Bagelen. Namun, seiring berjalannya waktu, pendirian sekolah meluas ke beberapa desa lain seperti Purworejo dan Wonodadi, termasuk pada periode sekitar tahun 1918. Sekolah di Bagelen juga kemudian berkembang dan didirikan di kedua wilayah tersebut dengan fokus pada pendidikan dasar, khususnya keterampilan bercocok tanam. Menjelang masa kemerdekaan, sekitar tahun 1915, didirikan pula *Vervolog School* yang berfungsi sebagai tempat pelatihan khusus bagi calon guru. Sekolah ini didirikan oleh pemerintah dan berlokasi di Pringsewu, yang pada masa itu menjadi pusat pemerintahan. Selain itu, terdapat pula HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) yang memiliki fungsi serupa dengan *Vervolog School*, dan juga didirikan di wilayah Pringsewu sebagai bagian dari perkembangan

pendidikan pada masa tersebut (Yuliyani, Kurniawan, & Hendratama, 2022).

4.1.6 Perkembangan Ekonomi Pertanian Desa Bagelen

Ekonomi merupakan berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup demi mencapai kesejahteraan. Dalam penelitian ini, fokus ekonomi yang dikaji adalah sektor agraris atau pertanian. Ekonomi pertanian dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan hasil dari kegiatan bercocok tanam (Balai Pustaka. 1990:220). Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama karena kondisi wilayah Bagelen yang mendukung untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Bagelen menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada hasil pertanian. Sistem pertanian yang berkembang di wilayah ini didominasi oleh persawahan, dengan dukungan saluran irigasi yang bersumber dari Way Semaka dan Way Ngison yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 1982 (Data Desa Bagelen, 2025).

4.1.7 Perkembangan Sosial Budaya Desa Bagelen

Secara sosial, masyarakat Desa Bagelen menunjukkan karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, yakni memiliki sikap ramah dan terbuka terhadap pendatang. Dominasi suku Jawa di desa ini dapat dilihat dari latar belakang sejarah kedatangan mereka, pola permukiman yang terbentuk, serta interaksi sosial yang terjalin antara masyarakat Jawa dan penduduk lokal. Hal ini juga tercermin dalam identitas serta budaya yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Lampung. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Jawa masih menjadi sarana komunikasi utama. Namun, seiring waktu, terjadi proses akulturasi sosial budaya, di mana masyarakat Jawa beradaptasi dengan lingkungan setempat sehingga menghasilkan

penggunaan bahasa Jawa dengan sentuhan atau dialek Melayu yang khas di Desa Bagelen. (Insani & Marzius, 2019).

Dalam aspek berpakaian, masyarakat Desa Bagelen sejak awal kedatangannya hingga saat ini tetap mempertahankan batik sebagai simbol identitas budaya. Namun, seiring dengan proses penyesuaian terhadap budaya lokal, motif batik yang berkembang mengalami perubahan. Batik yang digunakan saat ini umumnya berupa batik cap dengan ciri khas Lampung, seperti motif tapis, siger (mahkota adat perempuan Lampung), pelepai (perahu), gajah, serta ragam hias flora dan fauna. Penggunaan batik tidak hanya terbatas pada aktivitas sehari-hari, tetapi juga digunakan dalam kegiatan formal, seperti seragam dinas dan pakaian batik bagi pelajar di Desa Bagelen. Secara keseluruhan, kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Bagelen masih kental dengan pengaruh tradisi Jawa yang secara bertahap mengalami akulturasi dengan budaya lokal Lampung. Perpaduan budaya ini terlihat dari munculnya penggunaan bahasa Jawa dengan nuansa dialek Melayu serta berkembangnya batik bermotif Lampung yang menjadi bagian dari identitas khas masyarakat Bagelen (Insani & Marzius, 2019).

4.1.8 Mata Pencaharian Penduduk Desa Bagelen

Penduduk desa Bagelen sebagian besar bermata pencaharian petani, untuk lebih jelasnya urain sebagai berikut:

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	256	122
Buruh tani	349	301
Buruh migran Perempuan	-	-
Buruh migran laki-laki	-	-
Pegawai Negeri Sipil	98	93
Pengrajin industri rumah tangga	43	55
Pedagang keliling	26	32
Peternak	16	8
Dokter swasta	-	-

Bidan swasta	1	4
Pensiunan TNI / POLRI	19	1
Jumlah	802	614

Sumber: Data Desa Bagelen 2025

Berdasarkan data pada tabel 4.5 tersebut, mata pencaharian masyarakat di Desa Bagelen didominasi oleh sektor pertanian, khususnya sebagai buruh tani dan petani, yang menjadi sumber penghidupan utama sebagian besar penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi desa masih sangat bergantung pada sektor agraris. Di sisi lain, keberadaan profesi lain seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin industri rumah tangga, serta berbagai pekerjaan informal dan jasa meskipun jumlahnya lebih kecil, mencerminkan adanya keberagaman mata pencaharian yang turut mendukung perekonomian desa. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa Desa Bagelen memiliki pola ekonomi yang berbasis pertanian dengan dukungan sektor non-pertanian sebagai pelengkap. (Data Desa Bagelen, 2025).

4.1.9 Tenaga Kerja Desa Bagelen

Berdasarkan data Desa Bagelen (2015), Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berada dalam usia produktif dan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan barang maupun jasa. Umumnya, tenaga kerja mencakup penduduk berusia 15-64 tahun, baik yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, maupun yang tengah mempersiapkan usaha. Dengan kata lain, tenaga kerja merupakan modal utama dalam kegiatan ekonomi karena mereka berperan sebagai pelaku produksi dan pendorong pembangunan.

Tabel 4.6 Tenaga Kerja Berdasarkan Usia Penduduk

Tenaga Kerja	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Penduduk usia 0-6 tahun	0	0
Penduduk usia 7-18 tahun yang masih sekolah	612	736
Penduduk usia 18-56 tahun (a+b)	710	886
a.Penduduk usia 18-56 yang bekerja	945	765
b.Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	510	583
Penduduk usia 56 tahun ke atas	214	183
Angkatan kerja		
Jumlah (1+2+3+4)	2.991	3.153
Jumlah Total (Laki-laki + Perempuan)	6.144	

Sumber : Data Desa Bagelen (2025)

Berdasarkan tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Bagelen di dominasi oleh usia produktif, baik yang bekerja maupun yang belum bekerja, sehingga desa memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tingginya jumlah penduduk usia sekolah juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih sangat penting untuk diperhatikan guna mendukung kesejahteraan masyarakat di Desa Bagelen.

Tabel 4.7 Kualitas Angkatan Kerja Berdasarkan Usia Penduduk

Angkatan Kerja	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	4	2
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	12	9
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD	86	181
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	98	228
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	273	264
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	126	131
Jumlah	601	817

Sumber : Data Desa Bagelen (2025)

Berdasarkan data ketenagakerjaan, kualitas angkatan kerja masih menghadapi ketimpangan tingkat pendidikan. Sebagian besar tenaga kerja hanya berada pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah (SD, SLTP, dan SLTA), sementara jumlah yang menempuh pendidikan tinggi masih relatif terbatas. Di sisi lain, meskipun angka buta aksara sangat kecil, masih terdapat penduduk yang tidak tamat SD, yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia belum merata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja di Desa Bagelen memiliki potensi kuantitas yang besar, tetapi dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan, terutama melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta keterampilan kerja, agar mampu bersaing dan lebih produktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Desa Bagelen, 2025).

4.2 Gambaran Umum Program MBG di Desa Bagelen

4.2.1 Sejarah Program MBG di Desa Bagelen

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kecukupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan seperti siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia balita. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Di Desa Bagelen, program MBG mulai dilaksanakan sejak 8 September 2025 yang bernama SPPG Dapur Merdeka Sukaraja ditandai dengan peluncuran program tersebut sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi seimbang. Setelah program diluncurkan, pemerintah desa bersama pihak terkait mulai melaksanakan persiapan pelaksanaan program, seperti penunjukan pengelola dapur MBG, pengadaan bahan pangan, serta pengaturan sistem distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah desa, pengelola dapur MBG, tenaga memasak, serta pihak sekolah yang berperan dalam mendistribusikan makanan kepada peserta didik. Penyaluran bantuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Dapur Merdeka Sukaraja di Kecamatan Gedong Tataan dilaksanakan di sejumlah lembaga pendidikan, antara lain PAUD Nurul Iman, PAUD Kenanga, Taman Kanak-Kanak, SD Negeri 7 Gedong Tataan, SD Negeri 4 Gedong Tataan, SD Negeri 37 Gedong Tataan, serta SMP Nurul Iman. Selain menyasar peserta didik, program ini juga ditujukan kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil dan ibu menyusui, sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi keluarga. Sejak mulai dijalankan pada 8 September 2025, program MBG di Desa Bagelen diharapkan mampu berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, sekaligus mendukung kesehatan serta meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah. Di samping itu, program ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa melalui keterlibatan warga dalam pengelolaan kegiatan serta pemanfaatan bahan pangan lokal.

4.2.2 Tugas dan Struktur Pengelola Program MBG

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara efektif dan terarah, diperlukan adanya pembagian tugas yang jelas serta struktur pengelolaan yang sistematis. Setiap unsur dalam pengelolaan program memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang saling berkaitan guna mendukung tercapainya tujuan program secara optimal. Berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026), struktur pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan berbagai unsur pelaksana yang terdiri dari:

- a) Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
- b) Ahli Gizi
- c) Akuntan
- d) Asisten Lapangan

- e) Tim Persiapan
- f) Tim Pengolahan
- g) Tim Pemorsian
- h) Tim *Packing*
- i) Tim Distribusi
- j) Tim Pencuci Alat Makan

Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam menunjang efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, diharapkan setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

1. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan penanggung jawab utama dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan program di tingkat satuan pelayanan. Oleh karena itu, berikut berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) dijabarkan tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) antara lain:

- 1) Menjaga kinerja dan pengembangan tim, menetapkan jadwal kerja, serta mengelola konflik.
- 2) Mengelola seluruh aktivitas operasional harian, mulai dari proses produksi hingga distribusi.
- 3) Menjamin mutu makanan, kualitas pelayanan, serta kebersihan lingkungan kerja tetap terjaga.
- 4) Mengatur persediaan bahan baku dan peralatan, termasuk melakukan pemesanan untuk memastikan ketersediaan stok.
- 5) Mengawasi penggunaan anggaran, mengendalikan biaya operasional, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan agar sesuai tugas serta fungsinya.
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rutin setiap minggu terhadap seluruh karyawan di unit pelayanan.

- 7) Melaksanakan pengendalian mutu (*quality control*) terhadap bahan baku yang digunakan dalam setiap proses produksi.
- 8) Mengawasi kebersihan dan sanitasi lingkungan, termasuk pengendalian hama di area permukiman dan gudang, serta mengadakan kegiatan pembersihan bersama secara berkala setiap bulan sekali.

2. Pengawas Produksi dan Kualitas Gizi (Ahli Gizi)

Ahli gizi bertugas merancang menu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat, selain itu ahli gizi juga mengawasi kualitas bahan makanan, proses pengolahan, serta memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Menurut data dari SPPG Dapur Merdeka (2026), adapun tugas dan tanggung jawab seorang ahli gizi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan menu: berkolaborasi dengan tim dapur dalam merancang menu yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang berdasarkan standar yang berlaku
- 2) Penyusunan informasi gizi: menghitung serta menyajikan data kandungan nutrisi pada setiap hidangan, mencakup kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan zat gizi lainnya.
- 3) Layanan konsultasi gizi: memberikan konsultasi secara langsung dan tanpa biaya kepada siswa/i yang membutuhkan informasi mengenai asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi.
- 4) Edukasi dan pelatihan: memberikan pelatihan kepada staff unit pelayanan mengenai dasar-dasar ilmu gizi praktik pengolahan makanan yang higienis dan aman.
- 5) Pengendalian kualitas makanan: memastikan standar gizi dan mutu hidangan tetap terjaga dengan baik.
- 6) Monitoring dan evaluasi: melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja karyawan, terutama pada tahap persiapan, pengolahan, dan penyajian makanan.
- 7) *Quality control* harian: melaksanakan pengawasan mutu terhadap makanan yang diproduksi setiap hari.

- 8) Pengelolaan sampel makanan: bertanggung jawab dalam pengawasan dan pencatatan sampel makanan harian sebagai bagian dari penerapan keamanan pangan (*food safety*).

3. Pengawas Pengadaan Bahan Pangan (Akuntan)

Akuntan adalah tenaga yang memiliki peran dalam mengelola administrasi dan keuangan program, termasuk pencatatan, pelaporan, serta pengawasan penggunaan anggaran agar berjalan transparan dan akuntabel. Berdasarkan data dari SPPG Dapur Merdeka (2026) dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari akuntan dalam program MBG sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan kepala unit dalam menyusun rencana anggaran belanja harian.
- 2) Bertanggung jawab terhadap sistem operasional pelaporan distribusi (pawon dan pos).
- 3) Mengelola kegiatan operasional sehari-hari agar berjalan lancar, termasuk pengaturan stok, pemesanan, dan kebersihan.
- 4) Mengelola pencatatan keuangan yang mencakup pemasukan dan pengeluaran.
- 5) Mengatur sumber daya manusia, mulai dari penyusunan jadwal kerja, pelatihan, hingga pengelolaan kinerja karyawan.
- 6) Mendukung proses administrasi yang berkaitan dengan kebutuhan operasional harian.
- 7) Menyusun laporan keuangan secara berkala yaitu setiap dua minggu, bulanan, dan tahunan.

4. Pengawas Pemeliharaan dan Penghantaran (Asisten Lapangan)

Asisten lapangan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Mereka bertugas memantau jalannya program secara langsung, membantu koordinasi antar tim, serta melaporkan kondisi dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan program. Berikut tugas dan tanggung

jawab asisten lapangan dalam program MBG berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) sebagai berikut:

- 1) Bertindak sebagai pihak utama yang bertugas membangun serta memelihara kerja sama dengan mitra eksternal, khususnya pihak sekolah.
- 2) Memastikan seluruh proses produksi berjalan dengan lancar, tidak mengalami kendala, serta dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam kegiatan produksi agar tetap mencukupi.
- 4) Bertanggung jawab dalam dalam memperbarui data harian mengenai jumlah porsi yang diproduksi serta yang telah didistribusikan.
- 5) Menjaga dan memastikan hubungan kerja sama dengan pihak sekolah tetap harmonis dan terjalin dengan baik.
- 6) Melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kinerja bagian pengemasan, distribusi, petugas kebersihan, dan pencuci peralatan makan.
- 7) Mengelola dan mempertanggung jawabkan pengeluaran operasional selama kegiatan berlangsung seperti biaya bahan bakar, gas, dan lainnya.

5. Persiapan Bahan Makanan

Tim persiapan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan makanan dan peralatan yang dibutuhkan selama proses pengolahan. Mereka memastikan bahan yang digunakan dalam kondisi baik, bersih, dan siap untuk diolah. Berikut tugas dan tanggung jawab tim persiapan dalam program MBG berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahan baku selalu tersedia sesuai kebutuhan produksi.
- 2) Melakukan proses persiapan bahan seperti mencuci, mengupas, dan memotong sayuran serta bumbu.

- 3) Menghitung serta mencatat penggunaan bahan baku, misalnya perhitungan 1 kg wortel untuk sejumlah porsi tertentu.
- 4) Mencatat dan mengelola sisa atau limbah dari sayuran yang digunakan.
- 5) Menjaga kebersihan area kerja di area dapur atau ruang pengolahan.
- 6) Memastikan seluruh bahan yang digunakan tetap dalam kondisi bersih dan layak (higienis).

6. Pengolahan Bahan Makanan

Tim pengolahan memiliki tugas mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap dikonsumsi. Mereka harus memperhatikan standar kebersihan, teknik memasak yang cepat, serta menjaga kualitas dan cita rasa makanan. Berikut tugas dan tanggung jawab tim persiapan dalam program MBG berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) sebagai berikut:

- 1) Produksi Nasi
 - a. Menjamin ketersediaan nasi yang akan di produksi.
 - b. Melakukan perhitungan serta pencatatan jumlah porsi yang dihasilkan dari satu kali proses memasak nasi.
 - c. Memastikan beras yang digunakan telah dicuci dengan bersih dan memenuhi standar kebersihan.

- 2) Produksi Sayur
 - a. Menjamin ketersediaan sayuran dan bumbu-bumbu yang dibutuhkan pada saat proses pemorsian.
 - b. Menghitung serta mencatat kapasitas produksi dari satu kali penggunaan wajan.
 - c. Mencatat takaran dan jumlah bumbu yang digunakan, seperti minyak, garam, gula, dan bahan sejenis lainnya.
 - d. Melakukan pembersihan terhadap peralatan memasak serta area kerja setelah kegiatan produksi selesai.

3) Produksi Lauk

- a. Menjamin ketersediaan lauk-pauk pada saat proses pembagian porsi makanan berlangsung.
- b. Melakukan pencatatan serta perhitungan kapasitas produksi dalam satu kali proses memasak menggunakan wajan.
- c. Mencatat dan menghitung penggunaan setiap bumbu yang dipakai, seperti minyak, garam, gula, dan bahan sejenis lainnya.
- d. Melakukan pemeriksaan serta penghitungan terhadap bahan baku lauk, seperti ayam, ikan, daging, dan telur.

7. Pemorsian

Tim pemorsian bertugas membagi makanan ke dalam porsi yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Hal ini bertujuan agar setiap penerima manfaat mendapatkan jumlah makanan yang merata dan sesuai kebutuhan. Berikut tugas dan tanggung jawab tim pemorsian dalam program MBG berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dan memastikan ketersediaan wadah makanan beserta penutupnya dalam kondisi siap pakai.
- 2) Menjamin kecukupan persediaan bahan makanan seperti susu, nasi, lauk-pauk, dan buah-buahan.
- 3) Bertanggung jawab melakukan pengendalian mutu pada buah, termasuk proses penyortiran dan penimbangan saat buah diterima.
- 4) Memastikan setiap wadah makanan terisi secara lengkap, meliputi nasi, lauk, sayur, buah, dan susu.
- 5) Melakukan pendataan stok bahan baku seperti susu dan buah serta mengelola peralatan makan beserta tutupnya.
- 6) Membersihkan peralatan pemorsian serta area kerja sebelum mengakhiri aktivitas kerja.

8. Packing

Tim *packing* bertanggung jawab dalam mengemas makanan yang telah diporsikan agar tetap higienis dan aman selama proses distribusi. Pengemasan juga harus memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga sampai ke penerima. Berikut tugas dan tanggung jawab tim *packing* dalam program MBG berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) sebagai berikut:

- 1) Menjaga kebersihan, kerapian, dan standar higienitas di area kerja.
- 2) Melakukan proses pengemasan dengan menyusun makanan menjadi 10 tingkat (tier) dan mengikatnya menggunakan tali rafia.
- 3) Memindahkan hasil packing dari ruang pengemasan ke ruang distribusi yang telah disusun dalam 10 tier.
- 4) Menjamin makanan tetap aman dan tidak mengalami tumpahan selama proses penanganan.
- 5) Membersihkan peralatan pengemasan serta menjaga kebersihan lingkungan kerja di sekitarnya.

9. Distribusi

Tim distribusi bertugas menyalurkan makanan ke penerima manfaat. Mereka harus memastikan makanan di distribusikan tepat waktu dalam kondisi baik dan sampai kepada sasaran yang telah ditentukan. Berikut tugas dan tanggung jawab tim distribusi dalam program MBG berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) sebagai berikut:

- 1) Menjaga kendaraan tetap dalam kondisi bersih dan memenuhi standar kebersihan serta higienitas.
- 2) Melaksanakan tanggung jawab dalam proses pengangkutan serta pendistribusian makanan.
- 3) Bertanggung jawab memastikan makanan tetap dalam kondisi baik selama proses distribusi tanpa adanya tumpahan maupun kerusakan.

- 4) Menjamin setiap sekolah menerima jumlah porsi makanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, disertai bukti penerimaan dan mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku.
- 5) Mengumpulkan peralatan makan yang telah digunakan dari sekolah untuk kemudian diserahkan ke bagian pencucian.
- 6) Mengelola, menjaga, serta menyerahkan surat jalan kepada koordinator lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi distribusi.

10. Pencuci Alat Makan

Tim pencuci alat makan berperan menjaga kebersihan seluruh peralatan yang digunakan. Mereka memastikan alat makan dicuci dengan bersih dan higienis sehingga dapat digunakan kembali tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Berikut tugas dan tanggungjawab tim pencuci alat makan dalam program MBG berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh peralatan makan kotor yang diterima sesuai dengan jumlah porsi yang telah ditetapkan, termasuk wadah dan penutupnya.
- 2) Bertugas memilah sisa makanan seperti nasi dan sayuran yang berasal dari sekolah, kemudian melakukan penimbangan serta pencatatan data.
- 3) Melakukan proses pembilasan awal pada wadah makan dan tutupnya menggunakan air panas.
- 4) Mencuci wadah makan dan penutup dengan sabun cair, menyikat menggunakan spons, lalu membilasnya dua kali menggunakan air bersih hingga benar-benar higienis.
- 5) Memastikan peralatan makan yang telah bersih dikumpulkan dan dikirim kembali ke unit pelayanan melalui pengemudi.
- 6) Menjaga kebersihan area pencucian agar tetap higienis, tidak berbau, tidak terjadi penyumbatan, serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar.

Tabel 4.8 Struktur Pengorganisasian Pekerja SPPG Dapur Merdeka

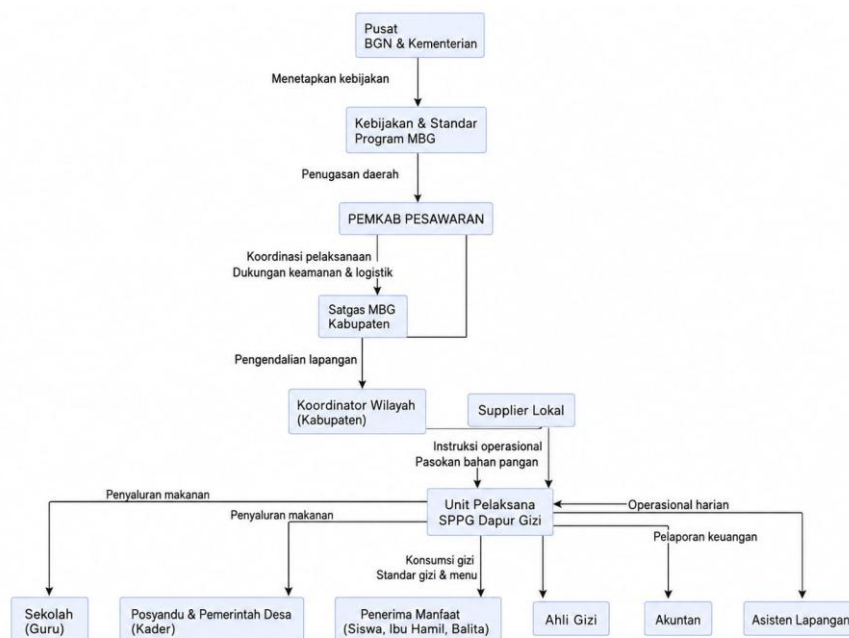
NO	NAMA	DIVISI
1.	Yaumil, S.E.	Kepala SPPG
2.	Lady Aprilia, A.Md., Gz.	Ahli Gizi
3.	Ana Setiawati, A.Md., Ak.	Akuntan
4.	Musta Sanjali, S.Pd.	Asisten Lapangan
5.	Syahrullazy	Keamanan
6.	Ray Danton	Kebersihan
7.	Emi Kurnia Wati	Kebersihan
8.	Feri Hartono	Koordinasi Persiapan
9.	Sri Pujiastuti	Koordinasi Pengolahan
10.	Wiwin Prasmono	Koordinasi Pemorsian
11.	Fendi Setiawan	Koordinasi Pencuci Ompreng
12.	Riwan Agus Setiawan	Koordinasi Distribusi
13.	Yayan Aprianto	Persiapan
14.	Augusta Grania	Persiapan
15.	Ismawati	Persiapan
16.	Suntia Lisma	Persiapan
17.	Analiza	Persiapan
18.	Susanti	Persiapan
19.	Erlina	Persiapan
20.	Maryati	Persiapan
21.	Sutatik	Persiapan
22.	Lasinem	Pengolahan
23.	Rubiyah	Pengolahan
24.	Lasiyem	Pengolahan
25.	Egiyatik	Pengolahan
26.	Aman Riyadi	Pengolahan
27.	Partini	Pengolahan
28.	Riyanto	Pengolahan
29.	Fadila Rohma	Pemorsian
30.	Erliani	Pemorsian
31.	Rela Pujianti	Pemorsian
32.	Fajri Hamsah	Pemorsian
33.	Suci Anggraeni	Pemorsian
34.	Iman Firdaus	Pemorsian
35.	Margiyati	Pemorsian
36.	Eka Yasmiana	Pemorsian
37.	Adelia Agustina	Pemorsian
38.	Muhammad Joni	Distribusi
39.	Jaka Setiawan	Distribusi
40.	Razky Ramadhani	Distribusi
41.	Ibad	Pencuci Ompreng
42.	Nikmatullah	Pencuci Ompreng
43.	Risky Guna Diat Mika	Pencuci Ompreng
44.	Muhammad Revan Pratama	Pencuci Ompreng

45.	Rendi Krisdiansyah	Pencuci Ompreng
46.	Dava Apri Aldiansyah	Pencuci Ompreng
47.	Vionda Nurhilmansyah	Pencuci Ompreng
48.	Tommy Asyari	Pencuci Ompreng
49.	Ahmad Syaifuddin	Pencuci Ompreng
50.	Azril Dzakwan	Pencuci Ompreng

Sumber : Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

Berdasarkan tabel 4.8 tentang struktur pengorganisasian pekerja SPPG Dapur Merdeka, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan dalam SPPG telah memiliki pembagian masing-masing. Struktur organisasi terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, asisten lapangan, keamanan, kebersihan, hingga bagian persiapan, pengolahan, distribusi, dan pencucian ompreng. Adanya pembagian divisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja di SPPG Dapur Merdeka telah terorganisasi dengan baik sehingga setiap pekerja memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG.

4.2.3 Struktur Alur Tata Kelola Program MBG



Gambar 4.4 Alur Tata Kelola Program MBG Kabupaten Pesawaran

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian (2026)

Pada gambar 4.4 di atas menjelaskan alur koordinasi program MBG di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Pada tingkat pusat, BGN bertanggung jawab untuk menetapkan standar gizi, kebijakan keselamatan pangan, protokol pengadaan bahan pangan, dan sistem pelaporan digital melalui Web Pelaporan MBG. BGN juga menetapkan standar produksi, jadwal menu harian, dan standar kualitas dokumentasi yang harus dipenuhi oleh semua pelaksana program. Standar ini menyediakan kerangka aturan untuk pemerintah daerah, SPPG, sekolah, dan pihak lain yang terlibat di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran membentuk Satgas MBG di tingkat kabupaten. Satgas ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, TP-PKK. Tugasnya adalah menghubungkan arahan BGN dengan pelaksanaan operasional di lapangan. Selain itu, bertugas sebagai pusat pengambilan keputusan dalam kasus kendala teknis, menentukan strategi adaptasi menu dalam situasi dimana bahan baku tertentu tidak tersedia, dan bertindak sebagai mediator dalam konflik antar lembaga. Dengan struktur ini, pemerintah kabupaten berperan penting dalam menjamin kolaborasi berjalan dengan baik.

Koordinator Wilayah (Korwil) berfungsi sebagai perantara antara Satgas dan unit pelaksana lapangan di bawah Satgas. Korwil bertanggungjawab memberikan penunjuk resmi, memantau SPPG di daerah, memeriksa kelengkapan laporan, dan menangani masalah sehari-hari. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit teknis pelaksana utama program ini. SPPG mengawasi produksi makanan, manajemen sanitasi dapur, pengawasan kualitas gizi, dan penyediaan makanan ke sekolah dan posyandu. Setiap SPPG memiliki kepala satuan, tim nutrisi, tim dapur, relawan, dan pendukung distribusi.

Bagian penting dari program ini adalah sekolah sebagai titik penerima manfaat. Operator sekolah sangat penting memastikan akuntabilitas data lapangan, karena mereka bertanggung jawab untuk menerima makanan, mendistribusikannya kepada siswa, dan menyimpan foto dan laporan harian pada sistem digital yang telah ditetapkan BGN. Namun, pada awal pelaksanaan sistem, banyak operator belum akrab dengan sistem dan membutuhkan bimbingan khusus.

Kader posyandu dan pemerintah desa di masyarakat bertanggung jawab untuk memantau ibu hamil, balita, dan penerima manfaat non-sekolah lainnya. Selain itu, mereka menerima distribusi makanan dari SPPG untuk memastikan bahwa penerima manfaat hadir dan untuk melacak tingkat kepatuhan. Sebaliknya, pemasok lokal dikenal juga sebagai supplier, dimasukkan dalam desain kelembagaan sebagai penyedia bahan baku utama. Supplier diwajibkan untuk memenuhi standar BGN tentang kebersihan, kualitas bahan, dan ketepatan waktu pengiriman. Koordinasi cepat dialihkan melalui rapat formal dan komunikasi informal ketika bahan baku terlambat atau tidak sesuai jadwal.

4.2.4 Jaminan Kualitas dan Kuantitas Makanan Program MBG

Berdasarkan data SPPG Dapur Merdeka (2026) mengenai jaminan kualitas dan kuantitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Kualitas makanan mencakup kandungan gizi, tingkat kebersihan, serta kelayakan konsumsi yang harus sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Di sisi lain, kuantitas makanan berkaitan dengan kecukupan porsi yang diterima oleh setiap penerima manfaat agar memenuhi kebutuhan gizi harian. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sistem pengelolaan yang terstruktur, mulai dari perencanaan menu, pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga tahap distribusi. Selain itu, peran pengawasan oleh pihak terkait seperti ahli gizi dan pengelola

program sangat diperlukan untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan tetap terjaga kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian, pemenuhan kualitas dan kuantitas makanan dapat berkontribusi dalam mendukung tujuan program MBG, yaitu meningkatkan status gizi penerima manfaat secara optimal.

a. Jaminan Kualitas

- 1) Makanan dalam Program MBG wajib diproduksi sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan (*higienis/food grade*), yang mencakup seluruh tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, proses pencucian menggunakan air bersih, pengolahan, pembagian porsi, penyajian, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
- 2) Sebelum makanan disalurkan, dilakukan pengambilan sampel terlebih dahulu sesuai dengan SOP yang berlaku oleh petugas yang berwenang untuk memastikan keamanan dan kelayakan konsumsi.
- 3) Setiap harinya perlu disiapkan sampel makanan (*food sample*) yang disimpan di dalam lemari pendingin sebagai arsip.
- 4) SPPG wajib memiliki sertifikasi halal.
- 5) Pengawasan kualitas makanan dilakukan dengan dukungan instansi terkait seperti BPOM dan Dinas Kesehatan (Data Dapur Merdeka, 2026)

b. Kuantitas makanan harus memperhatikan:

- 1) Pengeluaran harian disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan makanan.
- 2) Melakukan penimbangan atau gramasi untuk memastikan porsi sesuai dengan kelompok penerima manfaat.
- 3) Standar gizi dalam program MBG ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.9 Standar Gizi Program MBG di Desa Bagelen

No	Kelompok Sasaran	Energi (Kkal)	Energi (Kkal)	Protein (gr)	Lemak (gr)	Karbohidrat (gr)	Waktu Pemberian	Rujukan (%) AKG
1.	TK/PAU D/RA	328	23,4	25	23,7	20,9	Makan pagi	20-25
2.	Siswa SD (1-3)	368,8	22,3	23,1	24,1	20,1	Makan pagi	20-25
3.	Siswa SD (4-6)	531	32,2	33,1	30,9	31,0	Makan siang	30-35
4.	Siswa SMP	719	32,3	34,8	30,7	30,8	Makan siang	30-35
5.	Siswa SMA	762,5	32,1	36,4	31,0	30,4	Makan siang	30-35
6.	Ibu Hamil	818	33,3	40,4	32,1	31,9	Makan siang	30-35
7.	Ibu Menyusui	818	31,9	52,9	32,2	30,8	Makan siang	30-35
8.	Anak Balita	342	24,4	47,6	21,6	20,6	Makan pagi	20-25

Sumber : Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dijelaskan bahwa standar gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Bagelen telah disusun secara terarah dan berbasis kebutuhan setiap kelompok sasaran, sehingga menunjukkan pendekatan yang bersifat adaptif dan sesuai prinsip gizi seimbang. Perbedaan kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat pada setiap kelompok usia mulai dari PAUD, siswa SD hingga menengah, serta ibu hamil dan menyusui menunjukkan bahwa program ini tidak menggunakan satu standar umum, melainkan menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan, aktivitas, dan kondisi fisiologis masing-masing kelompok.

Selain itu, pengaturan waktu pemberian makanan (pagi dan siang) juga mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan energi harian sesuai aktivitas kelompok sasaran. PAUD dan balita diberikan pada pagi hari untuk mendukung aktivitas belajar dan tumbuh kembang, sedangkan siswa SMP dan SMA diberikan pada siang hari

untuk menunjang kebutuhan energi yang lebih besar selama kegiatan belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar gizi Program MBG di Desa Bagelen sudah cukup komprehensif dan sesuai prinsip pemenuhan gizi seimbang, karena mempertimbangkan aspek usia, aktivitas, dan kondisi biologis. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan agar standar yang telah ditetapkan benar-benar tercapai di lapangan (Data SPPG Dapur Merdeka, 2026).

4) Standar Makanan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

- Ketentuan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui dalam menu makan siang.

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	2.5	Beras	1 ¼ gelas	125	125
		Nasi	25 sdm	250	250
		Kentang	5 buah	618	525
		Mie kering	2½ gelas	125	125
		Roti putih	7 ½ lembar	175	175
Protein hewani*	2	Ubi	2 ½ buah	397	337,5
		Telur	2 butir	124	110
		Daging ayam	2 potong	138	80
		Daging sapi	2 potong	70	70
		Ikan segar	¼ potong	100	80
Protein nabati	1	Tempe	1 potong	50	50
		Tahu	2 potong	110	110
		Oncom	2 potong	40	40
Sayur	1	Wortel	1 mangkok sayuran	125	100
		Buncis	tanpa kuah	111	100
		Bayam	(100 gram)	141	100
		Kacang panjang		109	100
		Labu siam		120,5	100
		Kol		133	100
		Kangkung		167	100
Sawi		115	100		
Buah	1	Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	100
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	2	Minyak	2 sdt	10	10
		Santan	8 sdm	80	80
		Mentega	2 sdt	10	10

Gambar 4.5 Standar makanan ibu hamil dan menyusui untuk makan siang

Sumber: Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

5) Standar Makanan Balita

- Ketentuan gizi untuk balita dalam makan siang

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	1,25	Beras	3/5 gelas	62,5	62,5
		Nasi	12,5 sdm	125	125
		Kentang	2 ¼ buah	309	262,5
		Mie kering	1 ¼ gelas	62,5	62,5
		Roti putih	3 ¾ lembar	87,5	87,5
Ubi	1 ¼ buah	198,5	169		
Protein hewani	1	Telur	1 butir	62	55
		Daging ayam	1 potong	69	40
		Daging sapi ikan segar	1 potong 1 potong	35 50	35 40
Protein nabati	0,5	Tempe	½ potong	25	25
		Tahu	1 potong	55	55
		Oncom	1 potong	20	20
Sayur	0,5	Wortel	½ mangkok	62,5	50
		Buncis	sayuran	56	50
		Bayam	sayuran	70	50
		Kacang panjang	tanpa kuah	54	50
		Labu siam	(50 gram)	60	50
		Kol		67	50
		Kangkung Sawi		83 57,5	50 50
Buah	1	Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	392	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	1	Minyak	1 sdt	5	5
		Santan	4 sdm	40	40
		Mentega	1 sdt	5	5

Gambar 4.6 Standar makanan balita untuk makan siang

Sumber: Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

6) Standar Makanan siswa PAUD/ TK/ RA

- Ketentuan gizi pada siswa PAUD/TK/RA sederajat untuk makan siang

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	1	Beras	½ gelas	50	50
		Nasi	10 sdm	100	100
		Kentang	2 buah	247	210
		Mie kering	1 gelas	50	50
		Roti putih	3 lembar	70	70
Ubi	1 buah	159	135		
Protein hewani	1	Telur	1 butir	62	55
		Daging ayam	1 potong	69	40
		Daging sapi Ikan segar	1 potong 1 potong	35 50	35 40
Protein nabati	0,25	Tempe	¼ potong	12,5	12,5
		Tahu	½ potong	27,5	27,5
		Oncom	½ potong	10	10
Sayur	0,5	Kol	½ mangkok	62,5	50
		Kangkung Sawi	sayuran	56 70	50 50
		Wortel	tanpa kuah	54	50
		Kacang Panjang	(50 gram)	60	50
		Buncis		67	50
		Bayam		83	50
		Labu siam		57,5	50
Buah	1	Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
Sumber lemak	1	Minyak	1 sdt	5	5
		Santan	4 sdm	40	40
		Mentega	1 sdt	5	5
Susu*	0,625	susu	1 kotak kcl	125	125

Gambar 4.7 Standar makanan siswa PAUD/TK untuk makan siang

Sumber: Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

7) Standar Makanan Siswa SD/MI Sederajat

- Ketentuan gizi pada siswa SD/MI sederajat kelas 1-3 dalam makan siang

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	1,25	Beras	3/5 gelas	62,5	62,5
		Nasi	12,5 sdm	125	125
		Kentang	2 ¼ buah	309	262,5
		Mie kering	1 ¼ gelas	62,5	62,5
		Roti putih	4 lembar	87,5	87,5
		Ubi	1 ¼ buah	198,5	169
Protein hewani	1	Telur	1 butir	62	55
		Daging ayam	1 potong	69	40
		Daging sapi	1 potong	35	35
		Ikan segar	1 potong	50	40
Protein nabati	0,5	Tempe	½ potong	25	25
		Tahu	1 potong	55	55
		Oncom	1 potong	20	20
Sayur	0,5	Kol	½ mangkok	62,5	50
		Kangkung	mangkok	56	50

Gambar 4.8 Standar makanan siswa SD/MI Kelas 1-3 untuk makan siang

Sumber: Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

- Ketentuan gizi untuk siswa SD/MI sederajat kelas 4-6 dalam makan siang

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	1,5	Beras	¾ gelas	75	75
		Nasi	15 sdm	150	150
		Kentang	2 ½ buah	371	315
		Mie kering	1 ½ gelas	75	75
		Roti putih	5 lembar	105	105
		Ubi	1 ½ buah	238	202,5
Protein hewani	1	Telur	1 butir	62	55
		Daging ayam	1 potong	69	40
		Daging sapi	1 potong	35	35
		Ikan segar	1 potong	50	40
Protein nabati	0,5	Tempe	½ potong	25	25
		Tahu	1 potong	55	55
		Oncom	1 potong	20	20
Sayur	0,5	Kol	½ mangkok	62,5	50
		Kangkung	mangkok sayuran	56	50
		Sawi	70	50	
		Wortel	tanpa kuah	54	50
		Kacang Panjang	(50 gram)	60	50
		Buncis	67	50	
Buah	1	Bayam	83	50	
		Labu siam	57,5	50	
		Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	391	180
Sumber lemak	1	Melon	1 potong	327	190
		Pepaya	1 potong	147	110
		Minyak	1 sdt	5	5
Susu	0,625	Santan	4 sdm	40	40
		Mentega	1 sdt	5	5
		susu	1 kotak kcl	125	125

Gambar 4. 9 Standar makanan siswa SD/MI Kelas 4-6 untuk makan siang

Sumber: Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

8) Standar Makanan Siswa SMP/MTS Sederajat

- Ketentuan gizi pada siswa SMP/MTS sederajat dalam makan siang

Kelompok pangan	Satuan Penukar (SP)	Contoh bahan pangan	URT	Berat kotor (g)	Berat bersih (g)
Sumber karbohidrat	1,75	Beras	4/5 gelas	75	75
		Nasi	17 sdm	175	175
		Kentang	3 ½ buah	371	315
		Mie kering	1 ¼ gelas	75	75
		Roti putih	5 ½ lembar	105	105
Protein hewani	1	Ubi	1 ¼ buah	238	202,5
		Telur	1 butir	62	55
		Daging ayam	1 potong	69	40
		Daging sapi	1 potong	35	35
Protein nabati	0,5	Ikan segar	1 potong	50	40
		Tempe	½ potong	25	25
		Tahu	1 potong	55	55
Sayur	0,5	Oncom	1 potong	20	20
		Kol	½ mangkok	62,5	50
		Kangkung	½ mangkok sayuran	56	50
		Sawi	70	50	
		Wortel	tanpa kuah	54	50
		Kacang Panjang	(50 gram)	60	50
		Buncis	67	50	
Bayam	83	50			
Buah	1	Labu siam	57,5	50	
		Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
Sumber lemak	1	Pepaya	1 potong	147	110
		Minyak	1 sdt	5	5
		Santan	4 sdm	40	40
Susu*	1	Mentega	1 sdt	5	5
		susu	1 kotak	200	200

Gambar 4. 10 Standar makanan siswa SMP/MTS untuk makan siang

Sumber: Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

9) Standar Makanan Siswa SMA/MA Sederajat

- Ketentuan gizi untuk siswa SMA/MA sederajat dalam makan siang

Kelompok pangan	Satuan penukar (SP)	Contoh Bahan Pangan	URT	Berat Kotor (g)	Berat Bersih (g)
Sumber Karbohidrat	2	Beras	1 gelas	100	100
		Nasi	20 sdm	200	200
		Kentang	4 buah	494	420
		Mie kering	1 gelas	100	100
		Roti putih	6 lembar	140	140
Protein Hewani	1,5	Ubi	2 buah	318	270
		Telur	1 ½ butir	93	82,5
		Daging sapi	1 ½ potong	52,5	52,5
		Daging ayam	1 ½ potong	104	60
Protein Nabati	0,5	Ikan segar	1 ½ potong	75	60
		Tempe	½ potong	25	25
		Tahu	1 potong	55	55
Sayur	1	Oncom	1 potong	20	20
		Kol	1 mangkok	125	100
		Kangkung	sayuran	111	100
		Sawi	tanpa kuah	141	100
		Wortel	(100 gram)	109	100
		Kacang Panjang	120,5	100	
		Buncis	133	100	
Bayam	167	100			
Buah	1	Labu siam	115	100	
		Pisang	1 buah	67	50
		Jeruk	1 buah	153	110
		Semangka	1 potong	391	180
		Melon	1 potong	327	190
Sumber lemak	1	Pepaya	1 potong	147	110
		Minyak	1 sdt	5	5
		Santan	4 sdm	40	40
Susu*	1	Mentega	1 sdt	5	5
		susu	1 kotak	200	200

Gambar 4.11 Standar makanan siswa SMA/MA untuk makan siang

Sumber: Data SPPG Dapur Merdeka (2026)

4.3 Gambaran Umum Program PKH di Desa Bagelen

4.3.1 Alur Pelaksanaan Program PKH Di Desa Bagelen

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Program PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial bersyarat atau *Conditional Cash Transfer*, yaitu bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga kurang mampu dengan persyaratan tertentu, terutama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sebagian besar masyarakat penerima manfaat PKH di Desa Bagelen berasal dari keluarga transmigran yang sebelumnya datang dari Pulau Jawa. Pekerjaan utama mereka umumnya sebagai petani, buruh tani, buruh harian, pedagang kecil, serta ibu rumah tangga. Berdasarkan data yang didapatkan dari pendamping PKH di Desa Bagelen, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di wilayah tersebut tercatat sebanyak 285 keluarga (Data KPM PKH Desa Bagelen, 2024).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdiri dari berbagai kelompok sasaran, seperti ibu hamil, balita, lansia, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, serta kategori lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pelaksanaan PKH di Desa Bagelen dimulai dengan proses pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian dilakukan verifikasi oleh pendamping bersama pemerintah desa. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan potensi ketidaktepatan data, karena perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis maupun keterbatasan pembaruan data secara berkala.

Selanjutnya, tahapan sosialisasi dan pendampingan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kegiatan ini tidak hanya berperan sebagai sarana penyampaian informasi, melainkan sebagai upaya perubahan perilaku KPM, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelola keuangan bersama. Di Desa Bagelen, kegiatan P2K2 telah berjalan namun tingkat pemahaman dan partisipasi KPM masih bervariasi, sehingga belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kemandirian keluarga.

Dari sisi penyaluran, sistem non tunai yang diterapkan memberikan kemudahan dan transparansi dalam distribusi dana kepada KPM. Bantuan tersebut terbukti dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan ibu serta balita. Namun, dapat dilihat bahwa sebagian KPM masih menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan tersebut sehingga tujuan panjang berupa kemandirian ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pendamping PKH di Desa Bagelen juga menunjukkan adanya upaya pengawasan terhadap kepatuhan KPM dalam memenuhi kewajiban memastikan kehadiran anak di sekolah serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) selain berfokus pada pemberian bantuan finansial, melainkan berperan dalam mendorong perubahan perilaku sosial masyarakat penerima manfaat.

4.3.2 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Bagelen

KPM di Desa Bagelen merupakan keluarga yang telah memenuhi komponen sebagai penerima bantuan PKH. Jumlah KPM mencapai 285 keluarga menunjukkan bahwa program ini memiliki cakupan yang luas dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan (Data KPM PKH Desa Bagelen, 2024). Adapun kategori penerima PKH di Desa Bagelen meliputi:

- a) Ibu hamil dan ibu menyusui
- b) Anak usia dini (0-6 tahun)
- c) Anak sekolah (SD, SMP, SMA/ Sederajat)
- d) Lansia
- e) Penyandang disabilitas berat

Setiap KPM memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan program, seperti memastikan anak bersekolah secara aktif dan rutin memanfaatkan layanan kesehatan.

4.3.3 Peran Pendamping PKH di Desa Bagelen

Pendamping PKH memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program di Desa Bagelen. Berdasarkan data dari pendamping PKH, adapun tugas pendamping meliputi:

- a) Melakukan verifikasi dan validasi data KPM
- b) Memberikan sosialisasi dan edukasi melalui kegiatan P2K2
- c) Memantau kepatuhan KPM terhadap kewajiban program
- d) Menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak pemerintah

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) dalam KPM PKH pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, pengolahan hingga distribusi makanan, namun implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara desain program dan realitas sosial masyarakat. Program cenderung bersifat *top-down* sehingga belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi lokal, baik dari segi kebiasaan konsumsi, kapasitas pelaksana, maupun kesiapan infrastruktur. Akibatnya, pelaksanaan program belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal, meskipun secara administratif dan operasional telah berjalan.
- b. Program MBG memberikan dampak positif bagi KPM, terutama dalam meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta mendorong perubahan pola konsumsi yang lebih teratur pada anak. Namun demikian, dampak tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berkelanjutan, karena perubahan perilaku gizi dalam keluarga belum terbentuk secara kuat. Hal ini menunjukkan bahwa program lebih berhasil pada aspek pemenuhan kebutuhan jangka pendek dibandingkan dengan transformasi kesejahteraan dan pola hidup sehat dalam jangka panjang.
- c. Kendala pelaksanaan program MBG menunjukkan adanya permasalahan yang bersifat multidimensional, meliputi ketidaksesuaian menu dengan preferensi masyarakat, keterbatasan anggaran dan bahan pangan,

keterlambatan distribusi, rendahnya pemahaman gizi orang tua, serta lemahnya pengawasan di tingkat desa. Berbagai kendala tersebut tidak berdiri secara terpisah, tetapi saling berhubungan dan saling memperkuat, sehingga pada akhirnya menghambat optimalisasi pelaksanaan program secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kurangnya integrasi dalam sistem pelaksanaan, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

6.2 Saran

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian yang tertuang dalam skripsi ini, peneliti juga menyampaikan beberapa saran terkait upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program MBG di Desa Bagelen, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Bagelen diharapkan memperkuat koordinasi antara perangkat desa, pendamping PKH, pihak sekolah, dan pengelola MBG agar pelaksanaan program lebih terintegrasi dan efektif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala agar program tetap tepat sasaran dan berdampak berkelanjutan.
- b. Bagi pengelola MBG diharapkan perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti pemerintah desa, pendamping PKH, pihak sekolah, serta ahli gizi, supaya pelaksanaan program MBG lebih terintegrasi serta tepat sasaran, khususnya bagi keluarga PKH sebagai kelompok rentan. Selain itu, intensitas sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme program juga perlu ditingkatkan kepada orang tua penerima manfaat, sehingga keluarga tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi di sekolah, tetapi juga mampu menerapkan pola makan sehat di lingkungan keluarga.

- c. Bagi masyarakat Desa Bagelen, diharapkan tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga ikut aktif mendukung keberhasilan Program MBG melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program melalui pengawasan bersama, memberikan masukan kepada pelaksana, serta membangun kebiasaan konsumsi makanan sehat di lingkungan keluarga, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan dan tidak hanya terbatas pada saat pelaksanaan program berlangsung.
- d. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi (*mixed methods*) agar memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, memperluas cakupan penelitian, serta melakukan studi longitudinal. Selain itu, perlu mengombinasikan teori dan mengkaji peran aktor pelaksana secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S.2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Akhmad Rizqi Turama, formulasi teori fungsionalisme structural Talcott Parsons, *Jurnal Eufoni*, volume 2 nomor 2, 2020. Hal.66-67.
- Andin, A., Risti,D., Latifah,I., Panuntun, M.,Nur, M.,Selviani, R.,& Saptatiningsih, R.I. (2024a). Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 370-383.
- Andin, A., Risti,D., Latifah,I., Panuntun, M.,Nur, M.,Selviani, R.,& Saptatiningsih, R.I. (2024b). Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 370-383.
- Andriyanti,R., & Widyastutik,W. (2025). *Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani*. Jurnal Kebijakan Pertanian dan Lingkungan.
- Aprilia, N.P., & Azzahra, M.U.D. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara legacy project dan Solusi stunting. *Journal of Information System and Management*, 4(5), 19-22.
- Ashar, B.,& Pratama,H. (2025). *Dampak multidimensi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Jakarta*. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Badan Pusat Statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta:BPS.
- Balai Pustaka. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.

- Creswell, J.W., & Poth, C.N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). Efektivitas Program Makan Gratis pada Status Gizi Siswa Sekolah Dasar: Tinjauan Sistematis. *Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27-48.
- Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara. (2025). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. <https://dinsospppa.banjarnegarakab.go.id/pkh>
- Dwi Pratiwi, dkk. 2019. *Bagelen Desa Transmigrasi Pasca Reformasi di Lampung*. Seminar Nasional Sejarah ke-4 Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang.
- Eyes, I.N., & Nadia, Z.E. (2025). Evaluasi Program Makan Siang Gratis di Sekolah: dampak Terhadap Gizi, Kesehatan, dan Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(4).
- Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Indah Sari, N. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Perda Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Dinas PPPA Kabupaten Pesawaran)*. Universitas Islam Indonesia.
- Insani, Marzius. (2019). *Bagelen Desa Transmigrasi Pasca Reformasi di Lampung*.
- Junda, R. A. (2025). *Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.(2023). *Peningkatan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.(2022).*Pedoman Gizi Seimbang*.Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023*. Jakarta:Kemensos RI
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. <https://kemensos.go.id>

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.(2024). Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Upaya Peningkatan Gizi Anak Indonesia. Jakarta.
- Lubis, M.K., Dismawan, M.F., Hapsari, S.P., Rosidin, U., & Handoko. (2025). Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 1 Sukadanaham. *Jurnal Didaktiva Dwija Indria*, 13(6).
- M. Amral Sjamsu. 1956. *Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1905-1955*. Djambatan. Jakarta.
- Maleong, L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- M. Halwi, Dahlan. 2014. *Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa: Kolonisasi, Kokuminggakari, Dan Transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979)*. Jurnal Patanjala. 2014. Vol 6. No.3.hlm 335-348.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book, Edition. 3* Sage Publications. *Tousand Oaks, Carlifornia, 6*.
- Merlinda, A.A., & Yusuf, Y. (2025). Analisis program makan gratis Prabowo Subianto terhadap strategi peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah: Tinjauan sosiologi pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Reseach and Development*, 7(2), 1364-1373.
- Nabu, W., Smith, K., & Josep, J. (2018, Januari 9). TRANSMIGRASI: Jejak Kampung Jawa di Tanah Sumatera. Retrived 6 Februari, 2026, from Kompas: <https://interaktif.kompas.id/baca/transmigrasi/>
- Parsons, T. (1937). *The Structure of Social Action*. New York: McGraw-Hill.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York; Free Press.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Program Keluarga Harapan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Pritania, N. Sandoro, L. (2024). *Pendekatan Struktural Talcott Parsons Upaya Pelestarian Tradisi Kenduri Masyarakat Kerinci*. 28(1): 80-82.
- Qomarullah, R., Suratni,S., Wulandari S,L., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Intelektual Madani Indonesia (IJI Publication)*, 5(2), 130-137.

- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2014). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Sapitri, N., Wijaya, N.Z., & Arafat, A.H. (2025). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Dalam Meningkatkan Stabilitas Pangan dan Mengurangi Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC)*, 2(11).
- Saroso, O. (2014, Februari 6). *Sejarah Transmigrasi di Lampung: Mereka Datang Dari Bagelen*. Retrieved Januari 3, 2026, from Teras Lampung.com: <https://www.teraslampung.com/sejarah-kolonisas-di-lampung-mereka-datang-dari-bagelen/>
- Siti Meichati. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsito. Bandung.
- Smith, C.S. (1986). *Macmillan Dictionary of Anthropology*. London: Macmillan Press Ltd.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suardi, Suardi, dan Amysyah P. (2025). "Makan Bergizi Gratis dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi". *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Swasono, S.E. (1986). *Transmigrasi di Indonesia: Suatu Reorientasi*. Jakarta: UI Press.
- The World Bank. (2008). *Spending for Development: making the most of Indonesia's new opportunities (Vol.23, Issue 2)*.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Utama Kesejahteraan Sosial.
- World Bank. (2021). *Poverty and Shared Prosperity 2021*. Washington, DC: World Bank.
- Yuliyani, R., Kurniawan, D., & Hendratama, K. (2022). *Sejarah Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagai sumber pembelajaran sejarah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung*.